Warta
PERTANIAN
VOLUME I/EDISI JANUARI 2019
Menuju Kedaulatan Pangan

AWALI 2019, MENTAN LANGSUNG TANCAP GAS EKSPOR SAYURAN

KEMENTAN TEGAS BERANTAS KORUPSI

KEMENTAN DORONG PETANI BERKIPRAH DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Warta PERTANIAN
Menuju Kedaulatan Pangan
VOLUME I/EDISI JANUARI 2019

PENGARAH :
Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian

PENANGGUNG JAWAB:
Kepala Biro Humas
dan Informasi Publik

PENYUNTING:
Dani Gartina, S.Kom, MT

PELAKSANA :
Abiyadun, SE, MM
Erna Setyo Budi W, S.H, M.Kn
Agung Hari Ismanto, S.P, MM

ANGGOTA :
Imam Santoso, SE
Dra. Ria Satiti Irawati
Fajar Rahman M, S.IKOM
Alice Raga Dewi, S.Sos
Hendrayani Yacub, S.Sos
Adinda Mufidah, S.Sos, M.SI
M. Rizqy Hidayatsyah, S.SI
Kurniawatisari, S. Sos
Syarifah Hanoum, S.SI
Melani Frida Dewanti, A.Md

Isi diluar tanggungjawab percetakan
Dilarang mengutip tanpa izin
Majalah Warta Pertanian

SALAM **REDAKSI**

"Awali 2019, Mentan Langsung Tancap Gas Ekspor Sayuran". Permulaaan yang 'manis' untuk menjalankan sebuah aktivitas. Inilah yang dilakukan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam mengawali kegiatan pada 2019.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman langsung tancap gas menggenjot ekspor komoditas pertanian. Mentan melepas ekspor sayuran daun dari Lembang, Kabupaten Bandung Barat ke Singapura dan Brunei Darussalam, Kamis (3/1/2019).

Tak hanya sampai di situ, ekspor terus berlanjut. Di hari berikutnya, sebanyak 42 jenis komoditas hortikultura dikirim ke-12 negara di antaranya Singapura, Malaysia, Thailand, Hongkong, China, Dubai, Saudi Arabia, Pakistan, India, Bangladesh, Australia, dan New Zealand atau Selandia Baru.

Ke-42 jenis komoditas hortikultura itu seperti pisang, nenas, manggis, salak, alpokat, mangga, jeruk, durian, jambu biji, salak, melon, semangka dan sebanyak 29 jenis sayuran di antaranya *baby* buncis, buncis, selada air, kentang, petai dan jenis sayuran lainnya.

Pada 2018, ekspor holtikultura meningkat sebesar 11,92 persen dengan nilai lebih dari Rp 5 triliun. Sementara tujuan ekspor, yakni sebanyak 113 negara. Secara rinci, ekspor sayuran naik 4,8 persen, ekspor bunga naik 7,03 persen dan ekspor buah naik signifikan 26,27 persen.

Selain hortikultura, sektor pertanian juga mengekspor komoditas andalan lainnya seperti sawit, karet, kacang mede, kelapa, tembakau, kakao, teh, kopi, lada, dan madu. Kerja nyata Kementan pun berhasil menyetop impor jagung 3,6 juta ton, nilainya mencapai Rp 10 triliun dan di tahun 2018, ekspor jagung mencapai 380 ribu ton. Untuk meningkatkan nilai ekspor di sektor pertanian, pemerintah melalui Kementan terus menggenjot produksi pertanian.

Di samping itu, Kementan juga sudah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan kemudahan perizinan eskspor. Pengurusan izin yang tadinya memerlukan waktu pengurusan sampai 312 jam, sekarang hanya tinggal menjadi tiga jam saja! Pelayanan pun selama 24 jam dengan *Online Single Submission.*

Kebijakan itu tentu sangat menunjang peningkatan ekspor, sehingga kinerja sektor pertanian berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), akumulasi kinerja ekspor pangan sejak 2016 hingga 2018 naik 29 persen, inflasi pangan pada 2014 sebesar 10,57 persen turun menjadi 1,26 persen pada 2017.

Kemudian, investasi naik 110 persen dengan nilai Rp 94,2 triliun. Bahkan kontribusi sektor pertanian meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui Produk Domestik Bruto (PDB) naik 47,2 persen yang nilainya mencapai Rp 1.375 triliun. Sebuah angka yang menggembirakan dari sektor pertanian. Semoga sektor pertanian terus mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. (*)

Warta PERTANIAN
VOLUME I/EDISI JANUARI 2019
Menuju Kedaulatan Pangan

02

Mengawali agenda 2019, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman langsung tancap gas menggenjot ekspor komoditas pertanian.

08

Kementerian Pertanian (Kementan) tegas terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan kerjanya.

11

Kementerian Pertanian (Kementan) tengah mengoptimalkan lahan rawa di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel) seluas 200.000 hektare (ha) menjadi lahan pertanian modern.

14

Kementerian Pertanian (Kementan) berhasil mencapai target peningkatan produksi padi dan jagung yang dicanangkan pemerintah.

20

Kebijakan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam empat tahun telah mampu meningkatkan produksi, bahkan menyumbang capaian positif secara signifikan pada sejumlah indikator ekonomi dan kesejahteraan.

26

Selama empat tahun Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) telah berhasil dicapai swasembada beras dan jagung.

30

Kinerja Kementerian Pertanian (Kementan) mendapat aplaus atau apresiasi dari kalangan legislator.

40

Kementerian Pertanian (Kementan) terus melakukan terobosan meningkatkan produksi pertanian di berbagai komoditas melalui peningkatan minat generasi muda.

46

Ibu Negara RI Iriana Jokowi dan Ibu Mufidah Jusuf Kalla bersama Tim Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja (OASE KK) melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Senin (28/1/2019).

AWALI 2019,

MENTAN LANGSUNG TANCAP GAS

EKSPOR SAYURAN

KEMENTAN-Lembang: Mengawali agenda 2019, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman langsung tancap gas menggenjot ekspor komoditas pertanian. Kali ini, Menteri Amran melepas ekspor sayuran daun dari Lembang, Kabupaten Bandung Barat ke Singapura dan Brunei Darussalam, Kamis (3/1/2019).

Hadir pada pelepasan ekspor ini anggota Komisi IV DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dan Erislan, Direktur Jenderal Hortikultura, Suwandi dan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bandung Barat, Ida Nurhamidah.

Amran menjelaskan, volume ekspor sayuran segar dari Bandung Barat cukup besar. Ini mengingat potensi pengembangan sayuran di daerah ini, khususnya kawaasan pertanian di Lembang sangat luas dan subur serta dukungan dari pemerintah baik pusat maupun daerah sangat tinggi. "Dari Bandung Barat, volume ekspor sayuran setahunnya mencapai 1.500 ton setahun atau 3,5 sampai 4 ton per hari. Dulu kita impor, dari Australia dan Amerika, tapi sekarang ekspor. Ini luar biasa kita membalikan impor ke ekspor ke Singapura, Brunei Darussalam dan Hongkong. Ini serangan balik dari Indonesia," ujarnya saat meninjau budidaya sayuran dan melepas ekspor sayuran.

Jenis sayuran daun yang diekspor meliputi komoditas Buncis Kenya, Buncis Super, Edamame, Zuchini, Kyuri, Red Oakleaf dan Radichio. Jenis sayuran ini dapat tumbuh baik di daerah Bandung dan sekitarnya.

Amran menambahkan, kinerja sektor pertanian berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data BPS, akumulasi kinerja ekspor pangan sejak 2016 hingga 2018 naik 29 persen, inflasi pangan pada 2014 sebesar 10,57 persen turun menjadi 1,26 persen pada 2017. Kemudian, investasi naik 110 persen nilainya Rp 94,2 triliun, bahkan kontribusi sektor pertanian meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional (PDB) naik 47,2 persen, nilainya Rp 1.375 triliun.

"Ini prestasi baru sepanjang sejarah Indonesia. Ekspor kita dorong terus. Prestasi penurunan inflasi ini sulit ditemukan dalam sejarah, karena biasanya menggerakan inflasi 0,1 sampai 0,5 persen itu sulit. Kami sudah laporkan ke presiden bahwa sektor

pertanian berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi," jelasnya.

Karena itu, Amran mengungkapkan, dengan ekspor sayuran ini semakin membuktikan bahwa Pemerintah Jokowi-JK sangat berkomitmen meningkatkan produksi dan kualitas komoditas sayuran. Artinya tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, namun sanggup mengisi pasar luar negeri. "Ekspor ini pun membuktikan produk pertanian Indonesia makin diakui dan diterima di luar negeri. Ke depan untuk meningkatkan produksi dan volume ekspor, kami bantu bibit dan lainya bahkan kami rekrut petani milenial, target 1 juta petani" tegasnya.

untuk pertama kalinya mencatatkan rekor surplus setelah beberapa tahun selalu defisit," ujarnya.

"Kemudian, olume ekspor tanaman hias juga naik 7,03 persen. Nilai ekspor hortikultura sepanjang Januari-November 2018 mencapai Rp 5,69 triliun," tambahnya.

Terkait ekspor sayuran segar, Suwandi menegaskan, pihaknya akan terus mendorong perbaikan teknologi budidaya yang lebih ramah lingkungan. Hal ini dimaksudkan agar menghasilkan produk yang layak konsumsi dan mendukung peningkatan gizi masyarakat. "Potensi produksi sayuran kita mengisi pasar ekspor

pertanian. "Ekspor yang meningkat ini sudah menopang devisa yang masuk ke Indonesia. Jadi kita tidak terus-terusan impor pangan lagi. Malah pasokan pangan negara lain kita bisa penuhi. Ke depan, mudah-mudah Indonesia menjadi lumbung pangan Asia bahkan dunia bisa terwujud," bebernya.

Untuk itu, Cucun menegaskan, kinerja ekspor pangan saat ini sesui dengan harapan. Begitu pun terkait inflasi, penyumbang terbesarnya dari sektor pertanian. "Awalnya saya pesimistis ketika menghitung asumsi makro APBN 2019, betul nggak Menteri Keuangan berani menahan inflasi di angka tiga persen. Ternyata

Adapun harga sayuran asal Indonesia di pasar ekspor rata-rata 3,5 Dollar Singapura per kilogram. "Tentu ini menjadi nilai tambah bagi petani sayuran agar makin sejahtera," sambung Amran.

Direktur Jenderal (Dirjen) Hortikultura Suwandi menambahkan, ekspor hortikultura pada periode Januari-Desember 2018 naik 11,92 persen dibanding periode yang sama pada 2017 lalu. Pada periode tersebut ekspor sayuran naik 4,8 persen dan ekspor buah naik signifikan 26,27 persen. "Jenis buah yang banyak diekspor antara lain nanas, pisang dan manggis. Neraca perdagangan durian kita pada periode tersebut

masih terbuka luas. Kita tinggal tingkatkan lagi kualitas produksi dan penanganan pascapanennya, mengingat tuntutan konsumen makin menghendaki sayuran yang fresh dan menyehatkan," tukasnya.

Anggota Komisi IV DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengaparesiasi kinerja ekspor pangan yang dicapai selama di era Pemerintahan Jokowi-JK. Hal ini merupakan bukti dari dampak inovasi pertanian yang dilakukan Kementan seperti teknologi benih dan terutama alat mesin pertanian. Bahkan capaian ekspor naik sekitar 29 persen dan penurunan inflasi 1,26 persen merupakan wujud nyata penggunaan APBN sektor

dibuktikan penyumbang terbesarnya dari sektor pangan bayangkan dari 10,5 nenjadi 1,26 persen. Ini luar biasa, salah satu kerja nyata Mentan Amran Sulaiman," tegasnya.

Anggota Komisi IV DPR RI Erislan pun mengaku bangga akan kinerja pertanian saat ini. Selain capaian ekspor yang mengalami peningkatan dan berhasil membalikkan impor ke ekspor, juga menyambut baik program Mentan Amran Sulaiman untuk berdaulat benih. "Saya menyambut baik kerja Menteri Amran yang mau mengembangkan bibit sendiri. Kami pun mendukung kinerjanya yang terus dorong ekspor," akuinya. **(tim humas)**

KENDALIKAN INFLASI 2018, KESEJAHTERAAN PETANI MENINGKAT

KEMENTAN-Jakarta: Pemerintahan Jokowi-JK sukses menutup 2018 dengan menahan laju angka inflasi sesuai target APBN. Kenaikan harga beras yang sempat dikhawatirkan banyak pihak, pengaruhnya terhadap inflasi jauh lebih terkendali, sekitar 5,2 persen per tahun. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata laju kenaikan pada periode 2009-2013 sebesar 8,5 persen per tahun.

Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertanian (Kementan) I Ketut Kariyasa bersyukur bahan pangan turut andil dalam upaya pemerintah mengendalikan inflasi. "Ini menjadi bukti keberhasilan program peningkatan produksi dalam negeri," ujar Ketut dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (3/12/2018).

Seperti diberitakan, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan tingkat inflasi sepanjang tahun ini mencapai 3,13 persen year on year (yoy), atau menjadi salah satu capaian inflasi terendah. Secara keseluruhan angka inflasi ini baik karena lebih rendah dari inflasi 2017 di angka 3,61 persen. "Sesuai dengan prediksi awal tahun dalam APBN 2018 dan proyeksi Bank Indonesia (BI). Diharapkan pada 2019 bisa makin terkendali," kata Kepala BPS Suhariyanto dalam konferensi persnya di Gedung BPS, Rabu (2/1/2019).

Beberapa faktor utama yang membuat laju inflasi lebih terkendali adalah terjaganya keseimbangan antara sisi permintaan dan sisi penawaran, terutama komoditas pangan. "Pengendalian harga ini sangat penting, karena harga pangan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap garis kemiskinan," kata Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta di Jakarta.

BPS juga mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) pada Desember 2018 naik sebesar 0,04 persen menjadi 103,16 jika dibandingkan bulan sebelumnya. "Kenaikan NTP dikarenakan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) naik sebesar 0,54 persen, lebih besar dari kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) sebesar 0,50 persen," terang Suharyanto, kepala BPS.

NTP menunjukkan nilai tukar dari produk-produk pertanian terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga termasuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan atau daya beli petani. Sedangkan Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) nasional Desember 2018 sebesar 112,21 atau naik 0,26 persen dibandingkan NTUP bulan sebelumnya.

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian Kuntoro Boga Andri menyampaikan bahwa peningkatan daya beli petani ini tidak dapat dilepaskan dari upaya pemerintah dalam meningkatkan produksi dan mengendalikan harga di tingkat petani maupun konsumen. "Upaya pemerintah dalam pengendalian harga di tingkat petani maupun tingkat konsumen ini berdampak pada peningkatan daya beli petani. Di satu sisi, petani untung krn produk yang mereka hasilkan dibeli dengan harga tinggi. Di sisi lain, mereka pun bisa membeli kebutuhan-kebutuhan pokok dengan harga terjangkau," ungkapnya. **(tim humas)**

FOKUS
KEMBANGKAN INSTRUMEN DAGANG SPS

Kementan Dorong Ekspor Komoditas Pertanian

KEMENTAN-Jakarta: Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Badan Karantina Pertanian (Barantan) selama kurun waktu empat tahun terakhir telah lakukan negosiasi dagang dalam kerangka Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS), komoditas pertanian dengan 18 negara. ”Saat ini, kita terlalu menutup diri, tertinggal dari negara lain. Melalui perjanjian kerja sama SPS ini diharapkan komoditas kita ekspornya terus naik,” kata Dr Arifin Tasriff, kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan, Barantan saat memaparkan kerja sama SPS pada acara Bincang Asik Pertanian Indonesia di Gedung Pusat Informasi Agribisnis, Kementan pada Jumat (4/1/2019).

Hasil kerja peningkatan ekspor pada 2018 komoditas pertanian lewat perjanjian SPS di antaranya Indonesia –Australia CEPA senilai USD 667,8 juta untuk komoditas coklat, manggis, salak dan kopi; Indonesia –Chile CEPA senilai USD 143,8 juta untuk komoditas CPO dan jagung; ASIAN Hongkong China FTA senilai USD 3 miliar untuk komoditas tepung kelapa, mangga, sarang burung walet, madu, coklat, teh dan kopi; Indonesia –EFTA CEPA senilai USD 1,2 muliar untuk komoditas rempah-rempah, kakao, teh, kopi dan produk kayu.

Saat ini, lanjut Arifin, Indonesia telah berhasil malakukan perundingan perdagangan terutama untuk komoditas pertanian di antaranya Indonesia –European Union CEPA, Indonesia – Australia CEPA, Indonesia – Chile CEPA, Indonesia EFTA CEPA, Indonesia – Iran PTA, dan Regional Comprehensive Economic Partnership. Sementara yang dalam tahap proses perundingan diantaranya Indonesi – Japan EPA, Indonesia – Pakistan PTA, ASEAN Economic Community dan Indonesia Turkey CEPA.

Upaya menembus pasar tujuan ekspor melalui harmonisasi aturan dari otoritas karantina di negara tujuan ekspor terus dilakukan Barantan. Ini sejalan dengan instruksi Presiden Jokowi tidak hanya meningkatkan volume namun juga membuka market akses bagi jenis komoditas lain yang terus digali. Dukungan akselerasi ekspor produk pertanian di antaranya melakukan perundingan dibidang standar SPS dan prokol SPS negara, menyusun perjanjian protokol karantina dengan negara tujuan ekspor, mempercepat pemenuhan protokol karantina dan proses inline inspection bersama petani, pertukaran data elektronik sertifikat ke negara tujuan dan perundingan penyelesaian kasus SPS seperti untuk komoditas CPO, pala, kopi, teh, manggis dan salak.

Hadir pula dalam diskusi ini adalah para pelaku usaha masing-masing Indah Sofiati, eksportir jeruk purut dengan tujuan negara ekspor Perancis dan Hendro Juwono dari Asosiasi Eksportir dan Importir Sayur dan Buah. “Dukungan Barantan sangat nyata bagi penjaminan mutu dan kesehatan produk pertanian kita, dan surat penjaminan karantina kita dipercaya oleh karantina di Perancis,” kata Indah. **(tim humas)**

MENTAN LEPAS LAGI

EKSPOR 42 KOMODITAS KE-12 NEGARA

> Kami ekspor sebanyak 42 komoditas sayuran, buah, tanaman hias. Volume sekitar 10.000 ton setahun ke-12 negara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Hongkong, China, Dubai, Saudi Arabia, Pakistan, India, Bangladesh, dan Australia, New Zealand,"
>
> **Andi Amran Sulaiman**
> *Menteri Pertanian*

KEMENTAN-Bandung: Kementerian Pertanian (Kementan) kembali melepas ekspor sebanyak 42 jenis komoditas hortikultura ke-12 negara. Komoditas hortikultura tersebut seperti pisang, nenas, manggis, salak, alpokat, mangga, jeruk, durian, jambu biji, salak, melon , semangka dan sebanyak 29 jenis sayuran di antaranya baby buncis, buncis, selada air, kentang, petai dan jenis sayuran lainnya yang dihasilkan di Jawa Barat.

"Kami ekspor sebanyak 42 komoditas sayuran, buah, tanaman hias. Volume sekitar 10.000 ton setahun ke-12 negara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Hongkong, China, Dubai, Saudi Arabia, Pakistan, India, Bangladesh, dan Australia, New Zealand," ujar Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman didampingi Direktur Jenderal (Dirjen) Hortikultura Suwandi saat melepas ekspor di Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat (4/1/2019)

Adapun ekspor ini dilakukan PT Alamanda Sejati Utama. Sebagian besar komoditas hortikultura tersebut diambil dari petani. Hadir Anggota Komisi IV DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dan Erislan, Bupati Kabupaten Bandung Dadang M. Nasser dan Direktur Utama PT Alamanda Sejati Utama Komar Muljawibawa.

Amran menjelaskan, peningkatan ekspor pertanian memang menjadi program prioritas kementerian dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan agar berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian nasional. Pada 2018, ekspor holtikultura meningkat 11,92 persen dengan nilai lebih dari Rp 5 triliun di 2018 dengan negara tujuan ke 113 negara. Ekspor sayuran naik 4,8 persen, ekspor bunga naik 7,03 persen dan ekspor buah naik signifikan 26,27 persen.

"Kinerja ekspor ini dan yang kita lepas hari karena kebijakan yang tepat kita lakukan. Salah satunya memangkas perizinan. Jika dulu butuh hingga 13 hari bahkan hingga tiga bulan, kini eksportir hanya butuh tiga jam untuk mendapatkan izin ekspor melalui sistem online tanpa perlu tatap muka. Belum lagi kami cabut sebanyak 291 peraturan yang menghambat, reformasi birokrasi, dan penegakkan hukum bagi mafia," jelasnya.

”Pada 2019 ini, ekspor komoditas hortikultura terus kita tingkatkan. Setelah izin dipangkas, kita layani 24 jam dengan *Online Single Submission*, hasilnya ekspor manggis naik 500 persen, tahun kemarin kita ekspor langsung ke China, tanpa transit. Kami tidak akan biarkan pihak yang mau main-mainkan sektor pertanian, apalagi mafia,” sambungnya.

Amran juga menegaskan, Kementan terus melakukan upaya perbaikan kualitas sesuai permintaan negara tujuan, karena produk pertanian punya persyaratan yang ketat terkait isu higienitas dan keamanan. Upaya yang dilakukan, yakni dengan peningkatan produktivitas yang berkualitas dan berdaya saing di pasar internasional melalui penggunaan benih unggul hasil inovasi dan penerapan teknologi baik saat produksi hingga deliveri, termasuk armada angkut dengan alat pendingin dengan kapasitas besar.

”Lobi pun dilakukan agar komoditas Indonesia bisa tembus ke negara lain, termasuk pengiriman bisa langsung ke negara tujuan tanpa transit seperti sebelumnya,” tegasnya.

”Sinergi dengan eksportir juga sangat penting dalam mendorong kesejahteraan petani, karena kelompok tani atau gabungan kelompok tani agar dilibatkan sejak awal dalam proses produksi, dan diperkenalkan dengan pentingnya kontrol kualitas melalui praktik pertanian yang baik mulai dari produksi, manajemen, hingga kelembagaan yang efektif,” tambahnya.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, program yang fokus pada peningkatan produksi yang tidak hanya mencukupi kebutuhan dalam negeri tetapi juga ekspor merupakan program yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. ”Kami (Komisi IV DPR) siap-siap mengawal usulan anggaran pemerintah di sektor pertanian untuk program peningkatan ekspor ini. Apalagi hasilnya sudah jelas ada, capaian ekspor pertanian naik 29 persen dan penurunan inflasi pangan 1,26 persen pada 2017, sehingga ini merupakan wujud nyata penggunaan APBN yang baik di sektor pertanian,” ujarnya.

Bupati Bandung Dadang M. Nasser mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat turut mendukung penuh upaya peningkatan produksi khusus berkualitas ekspor. Karenanya, tanaman empat musim agar bisa berkembang di wilayahnya dan pembinaan petani perlu dikuatkan agar petani diuntungkan dan negara lebih kuat. “Sebagai negara agraris kita harus maju. Kita pernah penghasil stroberi terbaik. Kentang juga *alhamdulillah* sudah tumbuh. Meningkatkan ekspor dan produksi harus dengan bagaimana petani dibantu dengan benih hortikultura berkualitas agar petani bersemangat,” katanya.

Direktur Utama (Dirut) PT Alamanda Sejati Utama Komar Muljawibawa, selaku eksportir mengungkapkan, selama kebijakan pelayanan yang diberikan Kementan berupa pengurusan izin dokumen ekspor menjadi tiga hari, volume ekspor menjadi naik. Sebab dulu pengurusan izin dokumen ekspor memakan waktu hingga dua bulan. Komoditas hortikultura yang diekspor dihasilkan petani melalui pola kemitraan dan hasil pembinaan dari pemerintah.

”Untuk rencana ekspor sayuran sebanyak 200 ton per bulan atau 6,7 ton per hari. Yang diekspor seperti baby buncis 30 ton, buncis 45 ton, selada air 30 ton, kentang 60 ton, ubi manis 20 ton, ditambah petai 2 ton dan sayur lainnya. Untuk buah nonmusim, ada jambu biji merah 2 ton, rock melon 20 ton, dan salak 4 ton,” ungkapnya.

”Sementara buah musiman yang diekspor antara lain manggis dengan perkiraan 500 ton per musim dan Mangga 100 ton per musim,” tambah Komar. **(tim humas)**

Irjen:
Tak Ada Kompromi Bagi Koruptor

KEMENTAN TEGAS BERANTAS KORUPSI

KEMENTAN-Jakarta: Kementerian Pertanian (Kementan) tegas terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan kerjanya. "Tidak ada ruang atau kompromi bagi koruptor di Kementan atau yang mencoba bermain-main dengan anggaran. Konsekuensi bagi koruptor dan yang bermain anggaran adalah pemecatan," tandas Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian (Irjen Kementan) Justan Riduan Siahaan di Jakarta, Sabtu (5/1/2019).

"Tak akan kami beri ruang untuk oknum yang coba main-main. Bukan saja kami beri peringatan, tetapi dipecat," tegasnya.

Menurut Justan, penegasan ini menyusul terbitnya enam surat perintah penyidikan (sprindik) dari Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus), Kejaksaan Agung RI terkait dugaan penyimpangan pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) pada 2015 di antaranya roda empat, rice transplanter, seeding tray, dan pompa air.

Dalam berbagai kesempatan sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman selalu menyampaikan Kementan melakukan upaya-upaya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Hasilnya, Kementan dibawah kepemimpinan Amran berhasil meraih penghargaan sebagai Kementerian, Lembaga, dan Organisasi Pemerintah Daerah (KLOP) terbaik kategori Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dua tahun berturut turut (2017 dan 2018).

Pengelolaan administrasi keuangan yang akuntabel juga mengantarkan Kementan mendapat predikat WTP pertama dalam sejarah 2016 dan 2017 secara beruntun. Dengan demikian, penyalahgunaan anggaran dan korupsi dengan sistem pengadaan di LKPP e-katalog tidak mungkin dilakukan. Jadi lelangnya bukan di kementan tapi di Lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah atau LKPP yang bertanggung langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Justan menambahkan, sesuai audit BPK terkait pengadaan alsin pertanian pada 2015 tersebut ditunjukkan oleh tidak adanya temuan kerugian negara pada Audit PDTT BPK RI atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja TA. 2014, TA 2015 dan Semester I/2016 pada Ditjen PSP yang dilakukan pada 2017.

Secara prinsip, Kementan memberikan apresiasi bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan dan Kepolisian atas kerja samanya selama ini untuk melakukan pemberantasan korupsi. Bahkan, jajaran Kementan langsung mengundang KPK sebagai upaya pembuktian bahwa lembagaya sangat akuntabilitas, dalam hal ini soal penggunaan anggaran, serta upaya pencegahan penyelewengan.

"Untuk pencegahan, utamanya mengecek anggaran yang sudah disalurkan khususnya alat mesin pertanian. Kami ingin semua terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme," kata Justan.

Undangan serupa kami lakukan dengan Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Gandeng KPK dan Perangi Mafia

Sekedar diketahui, Kementan sudah menjalin kerja sama secara intens dengan KPK sejak 2015 lalu, dengan menempatkan satgas KPK di Kementan. Sejak saat itu, ancaman pemecatan demi pemecatan terus bergulir bagi oknum pegawainya yang bermain anggaran hingga penyalahgunaan wewenang.

"Kementan di bawah Amran Sulaiman sudah memecat dua eselon I yang terindikasi korupsi. Kementan juga mendukung penuh upaya penegakan hukum. Kami memberi apresiasi kepada jajaran Polri beserta Satgas Pangan. Kini lebih dari 497 kasus pangan diproses hukum," kata Justan.

Selain itu, Amran juga melakukan blacklis terhadap 15 importir nakal dan memantau 21 perusahaan. Disamping adanya demosi pegawai yang tidak disiplin dan tidak kompeten.

Muhamad Karim, pengamat ekonomi kerakyatan dari Universitas Trilogi sekaligus Dewan Pembina Indonesia Food Watch menilai keberanian Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman yang menabuh genderang perang melawan mafia pangan patut diacungi jempol.

Pasalnya, salah satu problem yang kerap menjadi kisruh suplai pangan di Indonesia ialah mafia pangan yang memanjakan harga dan kolusi dengan pengambil kebijakan impor, salah satunya mendorong kebijakan impor beras dengan alasan untuk stabilisasi harga dan cadangan nasional.

"Negara seolah-olah tak berdaya mengatasi masalah pangan yang dikuasai mafia. Membongkar mafia pangan ini memang bagaikan melawan tembok, tapi hasilnya sudah tampak dengan berhasilnya ditangkap oknum-oknum mafia pangan. Menteri Amran melawan mafia pangan tak ubahnya perang melawan mafia narkoba," ujar Karim.

Jangan sampai pengamat atau media yang selalu menyerang Mentan terlibat dengan mafia besar itu. Untuk diketahui, saat ini Mentan tengah gencar menggalakkan program swasembada pangan untuk beberapa komoditas strategis Indonesia. Ketegasan Mentan adalah upaya untuk melindungi jutaan perut bangsa ini, dan karenanya perlu dukungan banyak pihak.

Dalam keterangan terpisah, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo atau disapa Bamsoet mengapresiasi kinerja Mentan yang berhasil menekan inflasi bahan pangan dalam empat tahun terakhir dari 10.56 persen pada 2014 menjadi 1.26 persen pada akhir 2018, dan menggenjot ekspor pertanian yang meningkat mencapai 29 persen.

Bambang juga mengacungi Jempol Menteri Amran yang bersinergi dengan KPK dalam pemberantasan korupsi dan perang terhadap mafia pangan yang gencar dilakukan. Bambang menyatakan DPR siap membackup upaya-upaya yang dilakukan oleh Mentan dalam mencapai kedaulatan pangan.

Dalam catatan, Mentan sudah melakukan mengambil tindakan kepada 1.401 pegawai Kementan melalui demosi, mutasi dan bahkan pecat, termasuk dua pejabat Eselon I yang diberhentikan karena terindikasi korupsi. Hal ini untuk memastikan Kementan kredibel dan dipercaya untuk menghabisi mafia pangan.

Selain itu, sejak 2017, Satuan Tugas (Satgas) Pangan yang terdiri dari Mabes Polri, Kementan, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bekerja sama untuk memberantas mafia pangan dan tindak penyimpangan distribusi pangan lainnya.

Analis Komunikasi Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio mendukung upaya pencegahan yang dilakukan Kementan. Menurutnya ,pola-pola pencegahan seperti ini baik untuk diterapkan di Kementerian maupun Lembaga lainnya di pemerintahan. "Pemeriksaan anggaran pemerintah juga seharusnya bisa dilakukan pada kementerian dan lembaga lain. KPK harus diundang ke dalam pemerintahan. Bagus," katanya.

Amanat Nawacita

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementan Justan Riduan Siahaan mengatakan, pemerintahan yang bersih merupakan amanat Nawacita untuk mewujudkan pemerintahan bersih, efektif, dan demokratis yang harus dijalankan dengan sepenuh hati. "Prinsipnya adalah penegakan integritas. Hal itu benar-benar dilakukan Menteri Pertanian beliau selalu mencontohkan langsung dalam keseharian dan dalam kedinasan, bahkan bila jamuan dengan tamu dan pihak lain, mentan tidak pernah mau dibayari orang lain. Teladan itu kemudian diterapkan ke masing-masing individu dalam kementerian. Selain itu kita juga membangun sistem pengendalian intern di setiap unit," katanya.

Justan mengatakan, penyimpangan apapun tidak bisa ditoleransi. Menurut dia, standar kerja yang dibuat tinggi oleh pimpinan harus membantu fokus pada capaian sehingga tidak sempat melakukan penyimpangan. Hal ini juga berkaitan dengan komitmen dan visi memastikan lumbung pangan dunia 2045. **(tim humas)**

TEMBUS RP 906,1 TRILIUN, PDB PERTANIAN TERUS NAIK

KEMENTAN-Jakarta: Program dan kebijakan pembangunan pertanian yang dijalankan pemerintah saat ini mampu mendongkrak dan berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Terbukti dalam kurun waktu empat tahun terakhir, Produk Domestik Bruto (PDB) pada sektor pertanian memang terus mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. selama periode 2013-2017, akumulasi tambahan nilai PDB Sektor pertanian yang mampu dihasilkan mencapai Rp 906,1 triliun.

"Bahkan tercatat pada 2018 ini, nilai PDB mencapai Rp 395,7 triliun dibandingkan Triwulan III tahun lalu yang hanya Rp 375,8 triliun," ujar Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Pertanian (Pusdatin Kementan) I Ketut Kariyasa, Minggu (6/1/2019).

Selain tumbuh positif, peran sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi nasional juga semakin penting dan strategis. Hal ini terlihat dari kontribusinya yang semakin meningkat. Pada 2014, Sektor Pertanian---termasuk kehutanan dan perikanan---berkontribusi sekitar 13,14 persen terhadap ekonomi nasional dan pada 2017 meningkat menjadi 13,53 persen. "Kalau diperhitungkan dengan industri agro dan penyediaan makanan serta minuman yang berbasis bahan baku pertanian, kontribusinya bisa mencapai 25,84 persen. Dan ini berdampak pada perekonomian skala nasional," katanya.

Sektor pertanian, lanjut Kariyasa, menjadi semakin penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut turut tergambarkan dari inflasi bahan pangan terkendali, jumlah penduduk miskin di perdesaan semakin menurun dan kesejahteraan petani semakin membaik. Inflasi kelompok bahan makanan terus menurun, dari 10,57 persen pada 2014, masing-masing menjadi 4,93 persen pada 2015 dan 5,69 persen pada 2016. Bahkan pada 2017, selain turun menjadi 1,26 persen."Inflasi kelompok bahan makanan terus menurun. Artinya bisa dikatakan dalam sejarah Indonesia baru kali ini inflasi bahan makanan atau pangan lebih rendah dari inflasi umum yang hanya 3,6 persen," ujar Kariyasa.

Keberhasilan pembangunan pertanian juga tercermin dari kesejahteraan petani. Kesejahteraan itu bisa dilihat secara langsung melalui indikator Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) dan menurunnya jumlah penduduk miskin di perdesaan.

Pada 2014 nilai NTUP (Pertanian Sempit tanpa Perikanan) hanya sebesar 106,05; dan pada 2015 dan 2016 berturut-turut meningkatmenjadi107,44dan109,83.Nilai NTUP pada 2017 dan 2018 sampai Desember juga membaik menjadi 110,03 dan 111,56. Jumlah penduduk miskin di perdesaan juga terus menurun, pada Maret 2015 masih sekitar 14,21 persen (17,94 juta jiwa) dan pada bulan yang sama pada 2016 dan 2017 turun menjadi 14,11 persen (17,67 juta jiwa) dan 13,93 persen (17,09 juta jiwa). Demikian juga pada Maret 2018, kembali turun menjadi 13,47 persen (15,81 juta jiwa).

Dikatakan Kariyasa, membaiknya kesejahteraan petani juga bisa dilihat dari menurunnya indek Gini Rasio di perdesaan. Ini merupakan cermin dari pemerataan pendapatan di perdesaan yang terus membaik. Pada 2015, indek Gini Rasio di perdesaan sebesar 0,334 dan pada 2016 dan 2017 turun masing-masing menjadi 0,327 dan 0,320. "Atau dengan kata lain ketimpangan pendapatan antar-rumah tangga di perdesaan semakin rendah. Yang perlu dicatat adalah kerberhasilan telah berdampak pada pemerataan pendapatan di perdesaan. Kondiai mereka jauh lebih baik dibanding warga perkotaan," katanya.

Terobosan BEKERJA

Dalam upaya mengurangi jumlah penduduk miskin di perdesaan, Kariyasa menyebutkan, Kementan telah membuat program terobosan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA). Terobosan ini dinilai tepat sebagai solusi permanen untuk mengentaskan masyarakat petani dari kemiskinan dan pemerataan. "Sebab sebagian besar penduduk miskin di perdesaan adalah petani dimana lebih dari 70 persen pendapatan utamanya berasal dari sektor pertanian. Pada tahun ini, kita sudah terapkan program ini di 10 provinsi dengan sasaran 200.000 Rumah Tangga Petani Miskin (RTM)," katanya.

Di sisi lain, peningkatan produksi juga terus dilakukan melalui program Upaya Khusus (UPSUS) untuk padi, jagung, kedelai dan hortikultura. Selain itu, ada juga program Sapi Indukan Wajib Bunting (SIWAB) pada peternakan serta bantuan bibit pada perkebunan. "Program khusus ini mampu meningkatkan produksi komoditas pertanian secara signifikan, sehingga menyebabkan PDB sektor pertanian tumbuh positif secara konsisten," katanya.

Meningkatnya produksi juga sangat memuaskan karena mampu menyediakan ketersediaan pangan, sehingga dengan sendirinya menekan inflasi secara signifikan. Belum lagi adanya program asuransi pertanian dan program pengembangan pertanian modern melalui penggunaan alsitan secara masif. "Kedua program ini mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan keluarga petani karena menghemat biaya karena sebagian besar tenaga kerja sudah diganti oleh penggunaan alsintan yang jauh lebih efisien," pungkasnya. **(tim humas)**

KEMENTAN WUJUDKAN PETANI MILENIAL DI LAHAN RAWA

KEMENTAN- Banyuasin: Kementerian Pertanian (Kementan) tengah mengoptimalkan lahan rawa di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel) seluas 200.000 hektare (ha) menjadi lahan pertanian modern. Selain untuk meningkatkan produksi padi atau ketersediaan stok beras, pengoptimalan lahan rawa ini untuk mencetak petani milenial.

Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementan Andriko Noto Susanto menjelaskan, rawa raksasa yang sedang dibangun tersebut, produktivitasnya mengalahkan lahan sawah konvensional di Pulau Jawa. Arealnya luas, airnya melimpah, dan tenaga kerjanya sangat terbatas.

"Alat mesin pertanian (alsintan) menjadi pilihan untuk mengembangkan lahan rawa, selain produktif, cepat, biaya murah dan mampu mengatasi keterbatasan tenaga kerja," ujarnya saat mengunjungi lahan rawa bersama petani milenial di Desa Talang Makmur, Kecamatan Telang, Banyuasin, Senin (7/1/2019).

Menurut Andriko, alsintan agar berkelanjutan harus dikelola oleh sumberdaya manusia (SDM) pertanian milenial yang mempunyai *skill* atau keahlian tinggi, anti kemapanan, berani mengambil risiko, inovatif, dan suka menghadapi tantangan. SDM milenial sangat sesuai mengelola lahan rawa karena upah menjadi lebih menarik, tidak kena lumpur, dan tak kena panas, sehingga menjadi lebih kompetitif dibandingkan dengan bekerja sebagai buruh. "Petani milenial akan mengembangkan varian-varian pekerjaan yang semula dikerjakan secara konvensional menjadi mekanisasi," tutur dia. "Teladannya, panen, olah tanah, tanam, pengendalian OPT, pemeliharaan alat dan pemasaran baik online maupun offline," pinta Andriko.

Di kesempatan yang sama, Kepala Pusat Penyuluhan, BPPSDM Kementan Siti Munifah mengatakan, tranformasi bisnis proses ini memungkinkan tambahan lapangan kerja baru dan added value baru, konsumen baru. Bahkan brand baru yang mampu mendisrupsi teknologi konvensional yang selama ini tidak kompetitif. "BPPSDMP telah menginisiasi pendekatan ini di dua lokasi, yaitu Kabupaten Banyuasin, Sumsel dan Kabupaten Banjar di Kalimantan Selatan," katanya.

Sementara itu, Kepala Pusat Pendidikan, BPPSDM Kementan Idha Widi Arsanti menambahkan, dalam jangka panjang, optimalisasi rawa ini memungkinkan tambahan luas panen, produktivitas, dan hasil pertanian seperti padi, jagung, kedelai, sayur, ternak (itik, ayam, ikan) menjadi berlimpah. Areal pengembangan ini selanjutnya menjadi terbuka bagi generasi milenial untuk menggantungkan masa depannya di sektor pertanian.

"Mereka akan bangga dan percaya diri bertemu dengan orang-orang yang bekerja di sektor industri karena income-nya tinggi, keberagaman, berkelanjutan dan tahan terhadap gejolak ekonomi, politik, global maupun regional. Sepanjang ada kehidupan, pangan akan selalu dibutuhkan," bebernya.

Arsanti menegaskan, BPPSDMP membuka peluang bagi petani milenial untuk bergabung dalam mengelola lahan rawa. "Ini sejalan dengan penetapan Presiden Jokowi sebagai tahun pengembangan SDM," tegasnya.

Pejuang Lahan Rawa

Petani milenial sekaligus Kepala Desa di Telangrejo, Hendri mengungkapkan, bukanlah suatu hal yang mustahil baginya untuk mewujudkan mimpi menghidupkan lahan rawa guna mensejahterakan petani di sekitarnya dan juga memakmurkan keluarganya. Desa Telangrejo dengan luas 1.800 ha, sudah tertutupi dengan pertanaman padi yang luas menghampar sejauh mata memandang. "Awal perjuangan, saya dan kawan-kawan dimulai sekitar 20 tahun yang lalu, di mana lahan rawa masih belum dimanfaatkan," ungkapnya.

> "Alat mesin pertanian (alsintan) menjadi pilihan untuk mengembangkan lahan rawa, selain produktif, cepat, biaya murah dan mampu mengatasi keterbatasan tenaga kerja,"
>
> **Andriko Noto Susanto**
>
> *Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementan*

Alhasil, perlahan namun pasti, Hendri menanami lahan rawa tersebut. Dia mencoba memahami permasalahan yang dihadapi di lahan rawa dan juga berkomunikasi dengan banyak pihak untuk dapat memecahkan permasalahan tersebut. "Penggunaan alsintan baik traktor, combine harvester pada akhirnya sudah menjadi keharusan di lahan rawa. Bagaimana menumbuhkan kelembagaan juga merupakan tantangan tersendiri," ucapnya.

Perlu diketahui, hingga saat ini, Hendri dan kawan-kawannya sudah berhasil menaklukkan lahan rawa dan juga menerapkan teknologi untuk menghadapi permasalahan yang ada. Dengan penghasilan sekitar 15 juta per ha per tiga bulan, Hendri sudah lebih dari cukup untuk memberikan kesejahteraan bagi keluarga kecilnya. "Tantangan lahan rawa yang apabila dihadapi dengan sungguh-sungguh akan menjadi peluang emas bagi para pelaku di dalamnya," pungkas Hendri. **(tim humas)**

KEMENTAN DORONG PETANI BERKIPRAH DI ERA REVOLUSI INDUSTRI

KEMENTAN-Jakarta: Kementerian Pertanian (Kementan) terus mendorong petani untuk berkiprah di era Revolusi Industri 4.0. Program yang akan dikembangkan Kementan, yaitu petani milenial dan program sertifikasi kompetensil dengan harapan munculnya petani-petani kompeten pada masa datang. Cikajang, Garut bahkan terdapat seorang entrepreneur muda yang bernama Rizal Fakhreza, yang telah merangkap menjadi Duta Petani ASEAN.

Demikian diungkapkan Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementan Andriko Noto Susanto di Jakarta, Selasa (8/1/2019).

Menurut dia, tuntutan di era saat ini adalah kecepatan dan kreativitas. Digitalisasi, bioteknologi, dan efektivitas proses menjadi kunci dari revolusi agrikultur dalam era ini. Faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah bencana demografi, di mana jumlah penduduk dengan usia produktif lebih rendah dibanding penduduk usia non-produktif. "Lain lagi dengan Indonesia yang mengalami bonus demografi, sehingga revolusi tersebut belum dapat dirasakan di Indonesia. Terbukti dengan

banyaknya pertanian konvensional yang ditemui di berbagai wilayah Indonesia," ujarnya.

Andriko menjelaskan, selain yang diutarakan di atas, permasalahan yang juga terjadi di Indonesia yaitu mengenai akses menuju teknologi dan bahan yang berkualitas. Meskipun banyak teknologi pertanian yang dihasilkan di Indonesia, namun para petani di daerah belum memiliki akses yang baik ke sana.

Hal tersebut, ucap Andriko, diakibatkan kondisi sosio ekonomi masyarakat Indonesia yang majemuk. Andriko juga mengungkapkan

bahwa ketimpangan kelas sosial yang ada di Indonesia sangat tinggi. Sehingga, perlu segera dilakukan pemetaan petani, dari yang belum siap hingga yang siap menghadapi Revolusi Industri 4.0. "Sesuatu yang diperlukan Indonesia adalah mendorong petani lokal agar lebih mandiri untuk memenuhi kebutuhannya. Petani harus dibekali dengan pelatihan kompetensi sehingga mampu bersaing dan berkiprah di era Revolusi Industri 4.0," katanya.

"Tugas Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian adalah menjadi garda depan dalam menyiapkan SDM pertanian yang professional, mandiri dan berdaya saing yang tanggap, mampu menerima dan memproses dampak Revolusi Industri 4.0," tambahnya.

Bersertifikat Kompetensi

Kementan juga terus mendorong generasi muda Indonesia untuk bangkit dan meneruskan cita-cita pembangunan pertanian melalui program petani milenial. Pada petani milenial, generasi muda harus mampu berfikir kreatif, inovatif dan mampu untuk menunjukan keahlian serta kemampuannya sehingga memiliki daya saing. Generasi muda yang mempunyai daya saing diharapkan tidak akan tergeser oleh orang asing dan dapat berdiri di negerinya sendiri. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pada 2019 yang merupakan tahun SDM.

Kepala Pusat Pelatihan Pertanian BPPSDMP Kementan Bustanul menuturkan, harapan akan lahirnya petani-petani kompeten pada masa depan, membuat Kementerian Pertanian menumbuh kembangkan satu juta petani milenial dari seluruh Indonesia. Selain petani milenial, program lainnya yang akan dikembangkan adalah program sertifikasi kompetensi, dimana saat ini telah tersedia 98 skema sertifikasi bidang keahlian di sektor pertanian. "Untuk itu akan dilakukan pelatihan sertifikasi dalam jumlah besar untuk tenaga profesi bidang pertanian dari berbagai sektor bidang pertanian, khususnya siswa, mahasiswa, dosen dan tenaga pertanian lainnya," tuturnya.

Young Entrepreneur

Kepala Pusat Pendidikan BPPSDMP Kementan Idha Widi Arisanti menyebutkan, Cikajang, Garut telah melahirkan seorang entrepeneur muda yang bernama Rizal Fakhreza. Ia merupakan seorang entrepreneur muda sukses, yang dimulai dari rintisan usaha tani yang dibina melalui Program PWMP. "Pemuda ini berasal dari petani sayur dan buah biasa dan saat ini sudah menjadi Duta Petani ASEAN," sebut Santi, sapaan akrabnya.

Dia mengungkapkan, dalam mempertajam ilmu pengetahuan sebagai petani milenial, Rizal juga memanfaatkan kesempatan sekolah di Amerika dengan fokus pendidikan Bisnis Pertanian. Bisnisnya awal adalah petani sayur dan buah yang terus dibangun dan saat ini menjadi 'Agrowisata Garut' dengan nama 'Eptilu'.

"Usaha ini berkorporasi dengan Asosiasi Petani, Lembaga pemerintahan dan Instansi Bisnis lainnya. Agrowisata sebenarnya adalah upaya Rizal untuk mengenalkan betapa indahnya wirausaha di bidang pertanian dan betapa menariknya proses bisnis pertanian," ungkapnya.

Hingga pada acara The ASEAN Young Success Farmer pada 2018 yang diselenggarakan di Filipina, Rizal Fahhreza berhasil terpilih menjadi Duta Petani ASEAN. "Rizal sudah mendobrak imej petani itu kotor, kumuh, dan penghasilan yang tidak menjanjikan menjadi petani milenial yang menjadi *champion* di daerahnya," pungkas Santi. **(tim humas)**

SEPANJANG 2018, PRODUKSI PADI DAN JAGUNG SURPLUS

KEMENTAN-Jakarta: Kementerian Pertanian (Kementan) berhasil mencapai target peningkatan produksi padi dan jagung yang dicanangkan pemerintah. Berdasarkan data secara nasional sepanjang 2018, produksi padi mencapai 83,04 juta ton GKG atau setara dengan 48,3 juta ton beras. Angka ini tercatat masih surplus dibandingkan dengan angka konsumsi sebesar 30,4 juta ton beras. Begitu pula dengan jagung, pada periode yang sama produksinya mencapai 30,05 juta ton PK, sedangkan perhitungan kebutuhan sekitar 15,58 juta ton PK.

Demikian yang dinyatakan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Sumarjo Gatot Irianto dalam paparan di acara Bincang Asyik Pertanian Indonesia (Bakpia) di Kantor Kementan pada Jumat (11/1/2019). "Secara nasional selama setahun di 2018 bisa disimpulkan bahwa surplus padi dan jagung sudah bisa kita capai," kata Gatot.

"Tapi tentu jika diturunkan datanya spesifik per daerah dan periode tertentu ada yang kekurangan, tapi bisa ditutupi dari daerah lain yang punya kelebihan produksi. Hal ini akan sangat terekait dengan masalah distribusi," tambahnya.

Keberhasilan tersebut, lanjut Gatot, adalah hasil dari pelaksanaan Upaya Khusus Padi Jagung dan Kedelai (Upsus PJK) sejak 2015. Sejak dilaksanakannya, Upsus PJK mampu meningkatkan luas tanam padi secara tajam sebesar 2 juta hektare (ha), dari 14 juta hektar pada 2014 menjadi 16 juta ha pada 2018. "Dengan perbaikan prasarana dan sarana, penanganan pasca panen dan pengamanan produksi, produksi 2019 diproyeksikan akan meningkat lebih tinggi lagi di banding 2018," terangnya.

Potensi tambahan produksi pada 2019 berpeluang besar diantaranya melalui pengembangan padi dilahan rawa pasang surut/rawa lebak, pemanfaatan lahan kering untuk padi, jagung, kedelai, pengembangan budidaya tumpang sari, perbaikan teknologi benih, pupuk, budidaya, dan penanganan pasca panen, dan pengamanan produksi dari gangguan OPT.

Perluasan areal tanam program SERASI (Selamatkan Rawa, Sejahterakan Petani) misalnya, ditargetkan bisa memperluas lahan rawa pasang surut dan lebak tahun sebesar 500.000 hektare, terutama di Kalimanta Selatan (Kalsel) dan Sumatera Selatan (Sumsel). Diharapkan adanya program SERASI di rawa dapat meningkatkan indeks pertanaman dan mengembangkan korporasi petani. ”Dengan adanya program ini kita upayakan pertanaman di lahan rawa menjadi dua kali dalam setahun dari sebelumnya yang hanya satu kali,” tukas Gatot.

Selain di rawa, perluasan areal tanam juga dilakukan melalui pengembangan padi di lahan kering dengan diantaranya dengan budidaya tumpangsari. Tumpangsari sebagai solusi untuk mengatasi persaingan lahan antar komoditas. Pada 2019, program tersebut ditargetkan perluasan areal tanam mencapai 1,05 juta ha atau setara luas pertanaman 2,1 juta ha. Dari sisi pendapatan pun, budidaya tumpangsari bisa memperoleh keuntungan lebih besar daripada budidaya monokultur.

Siswono Yudo Husodo, pengamat pertanian yang juga menjadi pembicara dalam acara tersebut mengapresiasi capaian Kementan dalam meningkatkan produksi dan menjaga inflasi pangan. Mantan Ketua Himpunan Kerukunan Tani (HKTI) itu mengamini bahwa perluasan areal tanam merupakan faktor utama untuk terus menjaga produksi tanaman pangan agar bisa mencukupi kebutuhan penduduk yang pasti terus bertambah. ”Ekspor beras di atas 3 ribu ton merupakan prestasi besar dalam kebijakan pemerintah. Ke depan, luasan lahan milik petani masih perlu ditingkatkan dengan upaya strategis,” ujar Siswono.

”Upaya program perluasan areal tanam baru seperti lahan rawa dan lahan kering merupakan terobosan yang sangat baik, dan perlu disambut oleh gubernur dan bupati. Kita lihat misalnya, Dompu (Nusa Tenggara Barat), bupatinya punya komitmen, sehingga bisa menjadikan kabupaten yang miskin menjadi sejahtera karena masyarakat bisa bertumpu pada perluasan tanam jagung, bahkan pertanamannya sampai masuk ke hutan,” bebernya.

Disamping perluasan areal tanam, upaya yang dilakukan Ditjen Tanaman Pangan adalah melalui peningkatan produktivitas, yaitu dengan peningkatan penggunaaan benih varietas unggul dengan potensi produksi yang tinggi, pengembangan padi hibrida, anjuran penggunaan pupuk berimbang, pengamanan pertanaman melalui pengawalan pengendalian OPT serta menekan kehilangan hasil melalui penanganan pascapanen yang baik. **(tim humas)**

BEKERJA BUAHKAN HASIL, SAATNYA CICIPI TELUR

KEMENTAN-Tasikmalaya: Bantuan Ayam Kampung Petelur Unggul dari Kementerian Pertanian (Kementan) untuk Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat (Jabar) mulai membuahkan hasil.

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman pada Jumat (11/1/2019) pagi lalu datang ke Desa Kiara Kiarajangkung, Kecamatan Sukahening, Kabupaten Tasikmalaya, Jabar untuk mencicipi telur hasil ayam kampung unggul bantuan pemerintah tersebut. Karena sudah menunjukkan hasil, Mentan sekaligus mengkampanyekan Gerakan Makan Telur Ayam, sebagai upaya peningkatan asupan gizi RTM khususnya di Tasikmalaya.

Ratusan siswa-siswi Sekolah Dasar (SD) dan Santri dari beberapa pondok pesantren (ponpes) di sekitar lokasi ikut mencicipi telur hasil panen ayam kampung bantuan yang merupakan bagian dari Program Bedah Keluarga Rakyat Sejahtera (BEKERJA). "Kami datang untuk memastikan bantuan enam bulan lalu apakah sudah ada hasilnya? Ternyata *alhamdulillah*. Karena sudah menunjukkan hasil, bantuan kami tambah dua juta ekor tahun ini. Sehingga pendapatan masyarakat miskin bisa meningkat," ujar Amran di hadapan warga yang hadir, termasuk RTM, para penyuluh, kelompok tani, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan santri.

Mentan menambahkan, bantuan ini merupakan perintah Presiden Jokowo Widodo (Jokowi) sebagai program pengentasan kemiskinan pemerintah. Program bantuan sudah berjalan empat tahun. "Dan ini (2019) adalah tahun kelima pemerintah menyalurkan bantuan pertanian. *Nah* khusus untuk Jabar saja berkisar Rp 8-10 triliun," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Mentan juga menyerahkan bantuan hampir 600 ribu ekor ayam kampung petelur unggul. Bantuan yang merupakan bagian dari Program BEKERJA ini diberikan kepada 11 ribu lebih RTM di Desa Kiara Kiarajangkung, Kabupaten Tasikmalaya. "Kita semua berharap dengan bantuan ini cita-cita Desa Mandiri Bibit Ayam Kampung Unggul dapat terwujud,"ujar Amran di hadapan ribuan orang yang menyaksikan penyerahan bantuan, termasuk RTM penerima bantuan, penyuluh tingkat kabupaten, serta santri dari sekitaran Tasikmalaya.

Setiap RTM menerima 50 ekor ayam yang dilengkapi dengan kandang sederhana, pakan untuk pemeliharaan selama enam bulan, pelayanan vaksin dan obat hewan, serta pendampingan secara intensif (Bimbingan Teknis-Bimtek, dan pelatihan Training of Trainer-ToT). Untuk kepastian keberlanjutan usaha pengembangan ayam kampung unggul di perdesaan dapat terwujud, Amran juga menyerahkan bantuan berupa mesin tetas sejumlah 96 unit kepada 48 Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. "Dengan semangat dan optimisme para peternak, pengembangan ayam kampung unggul yang berkelanjutan akan menambah pendapatan," seru Mnetan.

Sementara itu, peternak RTM di Kampung Cipalegor, Desa Kiara Jangkung, Kecamatan Sukahening mengaku sangat merasakan manfaat bantuan Ayam Kampung Petelur Unggul dari pemerintah. Adang Suparno, salah satu penerima bantuan dari kampung Cipalegor Desa Kiara Jangkung, Kecamatan Sukahening meyakini ayam bantuan akan meningkatkan taraf hidup dengan pemberdayaan sumberdaya lokal. "Sangat membantu sekali. Ayam yang diberikan enam bulan lalu, empat bulan kemudian sudah mulai bertelur. Pada waktu bertelur berikutnya kami akan usahakan agar bisa ditetaskan," ujarnya.

Bantuan Hortikultura-Perkebunan

Selain ayam ternak, bantuan juga diberikan untuk komoditas hortikultura dan perkebunan. Di antaranya sarana produksi manggis meliputi bibit, pupuk organik,

pupuk NPK, dan produksi pepaya antara organik; sarana produksi dari benih,pupuk organik, hayati; sarana produksi seperti benih, pupuk organik hayati; bibit kopi Arabica ; alat mesin pertanian (alsintan) meliputi cultivator, handspray, rotary, traktor roda dua, traktor roda empat, dan pompa air.

pupuk hayati; sarana lain bibit pepaya dan pupuk jagung manis terdiri pupuk dan pupuk kacang panjang dan pupuk sarana

Sasar 800 Lebih Desa

Sejauh ini Program BEKERJA telah dilakukan di 10 provinsi, 22 kabupaten dan 807 desa yang melibatkan 200.000 rumah tangga miskin (RTM) pada 2018. Kabupaten Tasikmalaya menjadi salah satu target sasaran program ini yang meliputi 48 Desa di lima kecamatan antara lain Sukahening, Cikatomas, Salopa, Jatiwaras, dan Sodonghilir.

Kementerian Pertanian (Kementan) telah mencanangkan Program BEKERJA yang merupakan upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan melalui kegiatan pertanian yang terintegrasi dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin.

Dalam mencapai tujuan tersebut, Program BEKERJA melaksanakannya dalam tiga periode. Jangka pendek dilakukan dengan memberikan bantuan berupa tanaman sayuran yang dapat dipanen dalam waktu tigabulan, untuk jangka menengah diberikan bantuan berupa ayam/itik lokal maupun domba/kambing yang sudah dapat berproduksi dalam enam bulan, dan bantuan berupa bibit tanaman hortikultura (mangga, manggis, durian, pisang) dan tanaman perkebunan (kopi, kelapa dalam, cengkeh, pala). **(tim humas)**

GENJOT PRODUKSI PADI, GUYUR 40 TON BENIH VUB

KEMENTAN-Tasikmalaya: Untuk meningkatkan potensi hasil produksi padi secara nyata, Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian (Kementan) menyerahkan benih padi Varietas Unggul Baru (VUB) kepada petani dan penangkar melalui Gabungan Kelompok Petani (Gapoktan). Penyerahan ini merupakan program berkelanjutan dari program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA) yang digagas Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman.

"Totalnya sebesar 40 ton, tapi kami serahkan secara simbolis. Adapun VUB yang diserahkan terdiri atas Varietas Inpari 30 Ciherang Sub-1, Inpari 42 Agritan Green Super Rice dan Situbagendit. VUB ini juga memiliki keunggulan potensi hasil tinggi, pulen dan memiliki ketahanan terhadap beberapa penyakit utama padi," kata Kepala BB Padi Sukamandi, Priatna Sasmita pada Sabtu (12/1/2019).

Dia mengatakan, penyerahan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengganti penggunaan VUB lama karena ketahanannya terhadap Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) sudah tidak efektif. Untuk itu, penggantian VUB yang baru diprediksi mampu meningkatkan potensi hasil produksi padi secara nyata.

Untuk diketahui, varietas Inpari 32 HDB memiliki keunggulan dan potensi hasil tinggi sebanyak 8,42 ton per ha. Beras ini juga dikenal pulen dan tahan penyakit kresek (HDB=Hawar Daun Bakteri), sedangkan varietas Inpari 42 Agritan GSR (Green Super Rice) memiliki keunggulan tinggi, yakni 10,58 ton per ha serta relatif tahan terhadap penyakit kresek (HDB).

Menurut Priatna, varietas ini sangat ramah lingkungan karena penggunaan bahan kimia seperti pupuk dan pestisida relatif sedikit. Hal ini sebagai dampak dari implikasi adaptasi yang baik dan tahan terhadap beberapa OPT.

Varietas lainnya Situbagendit, merupakan padi gogo yang dapat beradaptasi baik terhadap kondisi sawah (basah) maupun lahan kering atau bersifat Amfibi. Varietas ini juga relatif tahan penyakit kresek. "Benih ini memiliki kategori kelas pokok yang sangat bagus. Karena itu, jika sebanyak 40 ton benih tersebut ditangkarkan semuanya pada luasan 2.000 hektare (ha), maka bukan tidak mungkin mampu mencukupi kebutuhan benih Tasikmalaya dengan luas baku lahan sawah 51.297 ha dan luas tanam 144.239 ha per tahun," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tasikmalaya Roni A. Sahroni mengapresiasi langkah Mentan yang memberi bantuan benih padi VUB untuk petani di Tasikmalaya. "Saya berharap agar semua petani di Tasikmalaya pada musim mendatang sudah menanam padi VUB, sehingga bisa mendongkrak produktivitas padi dan pendapatan petani di Tasikmalaya," katanya.

Sebelumnya Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pertanian (Kementan) atas semua bantuan yang diberikan. Dia berharap, dengan bantuan ini para petani di Jawa Barat lebih sejahtera dan mampu juara secara lahir dan batin.

"Program ini sangat bermanfaat khusunya untuk meningkatkan kesejahteraan petani di jabar secara lahir dan batin. Sekali lagi, saya mendukung program ini karena Jabar harus juara lahir batin. Untuk itu, kami akan naikan anggaran pertanian menjadi prioritas keempat di Jabar," pungkasnya. **(tim humas)**

MENGAKU TAK ETIS DAN MALU, PETANI MINTA MAAF

Mohon Video Buang Cabai Dihapus

KEMENTAN-Demak: Menyadari kesalahan akibat aksi buang cabai di jalanan pada Senin (14/1/2019), para petani di Desa Jerukgulung, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, Jawa Tengah meminta maaf atas kejadian tersebut.

"Sungguh kejadian tersebut adalah spontanitas dan kami menyadari perbuatan itu tidak etis dan membuat kami malu," ucap Sugiyono, ketua Kelompok Tani Indonesia Harapan Makmur.

Permintaan maaf tersebut juga dibarengi permohonan kepada para khalayak untuk menghapus beredarnya video aksi buang cabai, termasuk berita tidak benar terkait aksi tersebut. Hal lain turut disampaikan adalah menolak tegas pernyataan adanya impor cabai. "Kami menolak pernyataan adanya impor karena nyatanya tidak ada impor cabai. Kami juga berjanji tidak akan mengulangi dan akan lebih banyak melakukan diskusi dan dialog untuk mencari solusi seperti ini," tambahnya.

Para petani di wilayah ini sangat bersyukur atas perhatian pemerintah. Kementerian di bawah komando Andi Amran Sulaiman senantiasa sigap menangani permasalahan yang dialami para petani.

"Kami atas nama petani cabai di Desa Jerukgulung, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak mengucap terima kasih kepada Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman beserta Gubernur Jawa Tengah (Jateng) dan Bupati Demak dengan begitu sigap membantu menyelesaikan masalah di lapangan dengan sangat cepat. Sungguh ini di luar dugaan kami sebelumnya," lanjut Sugiyono.

Dalam pertemuan tersebut petani berkomitmen mengikuti anjuran untuk mengatur manajemen tanam, peningkatan dan estimasi biaya serta peningkatan kualitas hasil.

Selain itu, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman untuk bermitra dengan Toko Tani Indonesia (TTI) dan PT Indofood CBP sebagai wujud pengamanan harga panen. Selain itu petani juga sepakat untuk menjual hasil produksi ke pasar lelang. "Kami juga akan menjual melalui pasar lelang cabai sebagaimana telah dilakukan di daerah sentra lain seperti Sleman, Kulonprogo, Magelang, dan lainnya," tambah Sugiyono.

Hadir dalam penandatanganan nota kesepahaman tersebut antara lain Direktur Jenderal (Dirjen) Hortikultura Suwandi, Manager PT Indofood CBD Tjan Tjin Siang, Ketua Toko Tani Indonesia Mulyoto, Kadis Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak Wibowo. **(tim humas)**

DONGKRAK DAYA SAING SDM UNTUK TINGKATKAN EKSPOR PERTANIAN

KEMENTAN-Jakarta: Kebijakan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam empat tahun telah mampu meningkatkan produksi, bahkan menyumbang capaian positif secara signifikan pada sejumlah indikator ekonomi dan kesejahteraan. "Program Kementan selama pemerintahan Kabinet Kerja baik berupa bantuan alsintan (alat mesin pertanian), pembagian bibit unggul, subsidi pupuk mampu membuat petani semakin produktif, ke depan persoalan SDM (sumberdaya manusia), dan peningkatan daya saing akan menjadi fokus kita bersama," ujar Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembangunan Pertanian 2019 dengan tema "Mendongkrak Daya Saing Sumberdaya Manusia (SDM) Pertanian untuk Peningkatan Ekspor Pangan dan Pertanian" di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (14/1/2019).

Secara umum terdapat pencapaian yang baik dalam pembangunan pertanian dalam empat tahun terakhir. Indikator makro ekonomi menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian meningkat 47,2 persen dari Rp 994,8 triliun pada 2013 menjadi Rp 1.463,9 triliun pada 2018, dengan total akumulasi kenaikan Rp 1.375,2 triliun selama 2013-2018 atau lebih dari separuh dari Belanja Negara pada APBN 2018.

Dari faktor ekspor dan investasi, terlihat pembangunan pertanian juga sangat baik. Nilai ekspor pertanian meningkat 29,7 persen dari Rp 384,9 triliun pada 2016 menjadi Rp 499,3 triliun pada 2018, dengan total nilai ekspor Rp 1.764 triliun

selama 2015-2018. “Sementara nilai investasi pertanian meningkat 110,2 persen dengan total nilai investasi Rp 270,1 triliun selama 2013-2018,” jelas Amran.

Terkait indikator kesejahteraan, sektor pertanian berkontribusi sangat signifikan. Inflasi bahan makanan/pangan turun dari 10,57 persen pada 2014 menjadi 1,26 persen pada 2017, menunjukkan bahwa produksi pangan mampu menekan harga pangan. Meski demikian rendahnya inflasi pangan tidak mengorbankan kesejahteraan petani, terbukti Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat 0,22 persen dari 102,03 pada 2014 menjadi 102,25 pada 2018, begitu juga jika dilihat dari Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) meningkat 5,39 persen dari 106,05 pada 2014 menjadi 111,77 pada 2018.

“Dengan inflasi pangan yang rendah dapat dikatakan harga pangan secara umum bisa ditekan, tapi daya beli petani tetap naik dan kesejahteraan tetap petani semakin meningkat” tukas Amran.

Dilihat dari indikator kesejahteraan secara umum, sektor pertanian juga berkontribusi dalam menekan angka kemiskinan di pedesaan. Jumlah penduduk miskin di perdesaan menurun 10,87 persen dari 17,74 juta jiwa pada Maret 2013, menjadi 15,81 juta jiwa pada Maret 2018.

Fokus Tahun Ini

Sesuai dengan fokus pemerintah pada 2019, yakni pengembangan manusia Indonesia, Kementan juga akan memprioritaskan pada pengembangan sumberdaya manusia (SDM). Secara internal, menurut Menteri Amran, Kementan perlu mempertahankan capaian dalam meraih opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Begitu pula terkait penghargaan antigratifikasi dari KPK, dan praktik-praktik pemerintahan yang bersih sebagai bukti implementasi revolusi mental/reformasi birokrasi.

Sementara itu, Kementan juga perlu mengembangkan minat dan mutu pendidikan generasi muda pertanian. Setelah dikembangkan, pendidikan vokasi melalui Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan), peminatnya meningkat hingga 1.238 persen dari 980 orang tahun 2013 menjadi 13.111 orang pada 2018 untuk mencetak generasi petani milenial berorientasi ekspor.

“Pada 2019 ini, Kementan mencetuskan Gerakan Satu Juta Petani Milenial Berorientasi Ekspor dan peningkatan kualitas serta kapasitas Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) untuk meningkatkan daya saing SDM pertanian,” terang Amran.

Program lain yang perlu dikejar pada 2019, lanjut Mentan, adalah upaya pengentasan kemiskinan berbasis pertanian melalui program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (#BEKERJA) dan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (#SERASI). Program Bekerja akan memberikan bantuan produktif pada 400.000 Rumah Tangga Miskin (RTM).

“Bantuan berupa 20 juta ekor ayam kepada petani miskin, santri tani, dan lainnya sudah disiapkan. Paket bantuan juga memberikan bantuan benih/bibit tanaman hortikultura dan perkebunan yang dirancang dalam cluster atau kawasan,” jelas Amran.

Sementara terkait program Serasi, akan dilaksanakan pada lahan rawa pasang surut atau lebak seluas 500.000 hektare (ha0 yang difokuskan di Sumatera Selatan seluas 250.000 ha dan Kalimantan Selatan sebesar 250.000 ha.

Rakernas Pembangunan Pertanian 2019 ini dihadiri sekitar 1.500 orang peserta yang terdiri dari Kepala Dinas lingkup Pertanian Provinsi seluruh Indonesia, Kepala Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota sentra produksi pangan, Danrem dan Dandim sentra produksi pangan, Kepala Divisi Regional Perum Bulog Provinsi seluruh Indonesia, Jajaran lingkup Kementerian Pertanian dan undangan lainnya. **(tim humas)**

KEMENTAN-Probolinggo: Stok pangan strategis seperti beras, jagung, bawang merah, cabai, dan daging ayam dalam negeri aman. Di era pemerintahan Jokowi-JK, terbanyak menyelesaikan mafia pangan, sehingga sampai saat ini harga komoditas ini berada dalam kondisi terkendali dan sektor pertanian berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Demikian yang ditegaskan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman saat melakukan panen jagung di Desa Randu Merak, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur (Jatim), Rabu (16/1/2019). Hadir dalam kegiatan itu antara lain Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jatim Hadi Sulistyo, dan para petani jagung.

Menurut Amran, panen ini membuktikan ketersediaan jagung dalam negeri hingga saat ini aman. Sebab, empat tahun lalu, Indonesia impor jagung dari Argentina dan Amerika sebanyak 3,5 juta ton nilainya Rp 10 triliun. Kemudian pada 2018, Indonesia kembali impor jagung 100 ribu ton. "Tapi kita ekspor jagung 2018 sebanyak 380 ribu ton. Artinya pada 2018 produksi jagung surplus. Jadi kita harus *fair*, jangan menghukum petani-petani kita. Aku sangat cinta petani," ujarnya.

Terkait harga jagung, Amran menyampaikan sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi), harga jagung di tingkat petani tidak boleh di bawah Rp 3.150 per kilogram (kg). Perum Bulog telah diperintahkan untuk menyerap jagung petani dengan harga tersebut agar petani ke depan tidak merugi.

"Perintah Bapak Presiden, Bulog harus membeli jagung petani Rp 3.150 per kg. Tidak boleh di bawah harga ini. Bulog tolong serap cepat, jangan serap dari luar negeri. Kita harus lindungi petani," tegas Amran.

Berdasarkan data Dinas Pertanian Jatim, perkiraan luas panen jagung di Jatim pada Januari 2019 sebesar 17.286 hektare (ha), khususnya Kabupaten Probolinggo sebesar 3.000 ha. Dari luas panen tersebut, produksi jagung Jatim pada Januari sebesar 102.779 ton pipilan kering sedangkan produksi Jagung Kabupaten Probolinggo sebesar 21.000 ton dengan rata-rata produksi 7 ton per ha pipilan kering. "Petani-petani jagung sudah mulai memasuki masa panen di awal 2019. Ini bukti kita punya jagung. Bulog segera serap, isi gudangnya dengan jagung dari petani," ujar Amran.

Perkiraan Panen

Dari 38 Kabupaten di Jawa Timur, diperkirakan potensi panen jagung pada Februari 2019 mencapai 273.564 ha dengan perkiraan produksi mencapai 1,2 juta ton pipilan kering. Kemudian Maret perkiraan luas panen 175.011 ha dengan potensi produksi 636.610 ton pipilan kering.

"Pada Februari akan menjadi puncak panen jagung di Jawa Timur. Jika ditotal panen jagung Januari hingga Maret mencapai 465.861 ha dengan produksi mencapai 1,94 juta ton. Ini ketersediaan jagung yang luar biasa. Kebutuhan peternak layer mandiri bisa kita penuhi sendiri," kata Menteri Amran.

Perlu diketahui, pada 2018, produksi jagung di Jatim surplus sebesar 6,42 juta ton. Surplus ini diperoleh dari luas panen 1,17 juta ha dengan produksinya sebesar 6,54 juta ton, sementara kebutuhan jagung 2018 mencapai 122.724 ton.

Selain melakukan panen jagung, Amran juga menyerahkan sejumlah bantuan berupa benih sebanyak 2 ton padi Dan 75 ton benih jagung bantuan pusat ---untuk 5.000 ha---kepada petani. "Bantuan ini diharapkan akan meningkatkan produksi jagung, sehingga target produksi 33 juta ton di 2019 dapat tercapai," tandas Mentan.

Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari mengatakan, luas panen jagung saat ini di Kecamatan Paiton 600 ha dari prediksi panen sampai akhir Januari di Kabupaten Probolinggo 2.075 ha. Produktivitaa mencapai 8 ton/ha pipilan kering.

"Hampir 75 persen dari 1 juta jiwa mayoritas menjadi petani. Kehadiran Bapak Menteri, kami akui memberikan semangat bagi petani kami menjadi profesional. Empat tahun lalu hadir di Probolinggo, tanam bawang. Kini terbukti, Probolinggo menjadi penghasil bawang merah," ujar Puput.

Kinerja Empat Tahun

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menambahkan, pada 1984, Indonesia pernah mencapai swasembada beras. Padahal saat itu Indonesia masih mengimpor beras sebesar 414 ribu ton. Menurut FAO (1999), suatu negara dikatakan swasembada jika produksinya mencapai 90 persen dari kebutuhan nasional. Artinya, Indonesia dalam empat tahun terakhir sudah bisa berswasembada beras.

"Kemudian dari 2016 sampai 2018 pun beras surplus. Pada 2016 dan 2017 tidak ada impor, kalau impor 2016 itu limpahan impor 2015. Kemudian 2018 beras surplus 2,85 juta ton. Ini berdasarkan data resmi dari BPS, adapu impor 2018 sebagai cadangan," ujar Amran.

"Ada yang menarik, pada 1984, jumlah penduduk Indonesia 100 juta jiwa, sedangkan sekarang mencapai 260 juta jiwa. Artinya naik dua kali lipat. Dengan demikian, masalah swasembada beras sudah selesai. Ini yang harus dipahami, supaya masyarakat tidak dibuat bingung," pintanya.

Amran pun menekankan bahwa pembangunan pertanian tidak hanya mengurus beras, akan tetapi

STOK AMAN, HARGA TERKENDALI, MAFIA DILIBAS

sektor pertanian memiliki 460 komoditas yang harus dijaga siang malam. Menariknya, ekspor komoditas pertanian 2018 melejit yakni 29,7 persen. "Kemudian stok beras sebagai cadangan saat ini dua juta ton. Cadangan itu, kalau stok intinya tidak ada masalah, nanti tidak akan dipakai. Standar cadangan beras nasional 1 juta ton, artinya cadangan beras kita sekarang dua kali lipat," jelasnya.

Kemudian, lanjut Amran, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), stok beras yang berada di rumah tangga mencapai delapan sampai Sembilan juta ton. Dengan demikian, jika ditambah stok beras di Bulog sekitar dua juta ton, stok beras nasional saat ini mencapai 10 sampai 11 ton. Jika konsumsi beras nasional 2,5 juta ton, artinya stok beras yang kita punya bisa mencukupi kebutuhan selama empat bulan.

> "Artinya setiap hari terjadi olah tanah, tanam dan panen. Jangan dibayangkan pertanian Indonesia seperti 30 tahun lalu. Makanya penduduk dua kali lipat dari 1984, kita bisa memberi makan,"
>
> **Andi Amran Sulaiman**
> ***Menteri Pertanian***

"Kemudian, kita masih punya produksi padi dari *standing crop* atau yang tanaman padi yang berdiri hari ini 3,88 juta ha, jika produktivitas 5,3 ton per ha, menghasilkan beras 20 juta ton gabah kering giling, kalau dibagi dua, menghasilkan beras 10 juta ton. Total beras ini mampu mencukupi kebutuhan empat bulan. Dengan demikian, stok beras aman hingga delapan bulan ke depan," tegas Amran.

Harus dicatat juga, tegas Amran, Kementan terus mendorong transformasi pertanian dari pertanian tradisional ke pertanian modern. Dengan modernisasi target peningkatan produksi hasil pertanian menjadi lebih visibel untuk diwujudkan. "Artinya setiap hari terjadi olah tanah, tanam dan panen. Jangan dibayangkan pertanian Indonesia seperti 30 tahun lalu. Makanya penduduk dua kali lipat dari 1984, kita bisa memberi makan," ucapnya.

Terkait harga beras, Amran menampik pihak yang mengatakan, harga beras Indonesia tertinggi di dunia. Padahal, berdasarkan data FAO, harga beras Indonesia berada di posisi 84 dari seratus lebih negara. Dengan demikian, harga beras Indonesia berada diposisi terendah dan harga beras paling tinggi, yakni Jepang.

"Harga beras di Jepang mencapai Rp 57 ribu per kilogram. Jadi jangan lagi polemik. Kalau produsen beras, tahun 2017 Indonesia nomor tiga dunia. Catat *ya*, ini data FAO," tandasnya.

Adapun beras selalu menjadi polemik, Amran menjelas, ini karena olah banyak mafia pangan. Meski demikian, di era pemerintahan Jokowi-JK, Kementan bersama Panglima TNI, Kapolri, KPPU, dan Bulog terbanyak menyelesaikan mafia pangan. Yakni, sebanyak 409 mafia pangan sudah dikirim ke penjara dan yang sedang proses hukum sebanyak 782 perusahaan telah ditindak dengan tegas.

"Sebanyak 15 sudah di-*blacklist* dan sebentar lagi akan ditambah 21 perusahaan. Aku tidak biarkan mafia pangan berkeliaran di Indonesia. Ini dicatat *ya*. Jangan petani diatasnamakan, marah nanti petani dan Anda kualat. Tidak ada kompromi bagi mafia pangan, aku *beresin*, ini perintah Bapak presiden. Sebab ketahanan pangan menyangkut ketahanan negara," tegasnya.

Amran menambahkan, kebijakan Kementan dalam empat tahun tidak hanya mampu meningkatkan produksi, tetapi juga mampu menyumbang capaian positif secara signifikan pada sejumlah indikator ekonomi dan kesejahteraan. Bahkan selain berhasil swasembada padi dan jagung, Kementan juga telah berhasil swasembada bawang merah, cabai, ekspor domba, dan daging ayam.

"Indonesia pertama kali dalam sejarah, berhasil ekspor daging ayam olahan ke Jepang, ekspor domba ke Malaysia menggantikan Australia sebagai importir Malaysia. Jadi tuntas *ya*, kita sudah selesaikan dan ekspor banyak komoditas pertanian," tegasnya.

Berdasarkan data BPS, Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian meningkat 47,2 persen dari Rp 994,8 triliun pada 2013 menjadi Rp 1.463,9 triliun pada 2018, dengan total akumulasi kenaikan Rp 1.375,2 triliun selama 2013-2018 atau lebih dari separuh dari Belanja Negara pada APBN 2018.

Dari faktor ekspor dan investasi, terlihat pembangunan pertanian juga sangat baik. Nilai ekspor pertanian meningkat 29,7 persen dari Rp 384,9 triliun pada 2016 menjadi Rp 499,3 triliun pada 2018, dengan total nilai ekspor Rp 1.764 triliun selama 2015-2018. "Sementara nilai investasi pertanian meningkat 110,2 persen dengan total nilai investasi Rp 270,1 triliun selama 2013-2018," jelas Amran.

Sementara itu, Amran menambahkan terkait indikator kesejahteraan, sektor pertanian berkontribusi sangat signifikan. Inflasi bahan makanan atau pangan turun dari 10,57 persen pada 2014 menjadi 1,26 persen pada 2017, menunjukkan bahwa produksi pangan mampu menekan harga pangan. Namun demikian rendahnya inflasi pangan tidak mengorbankan kesejahteraan petani. "Dengan inflasi pangan yang rendah dapat dikatakan harga pangan secara umum bisa ditekan, tapi daya beli petani tetap naik dan kesejahteraan tetap petani semakin meningkat," pungkas Amran. **(tim humas)**

KEMENTAN GENCAR

TRANSFORMASI
PENDIDIKAN PERTANIAN DI ERA MILENIAL

KEMENTAN-Jakarta: Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa perubahan yang teramat besar di berbagai bidang kehidupan. Tidak terkecuali perkembangan di bidang pertanian. Masuknya pengaruh globalisasi, pendidikan masa mendatang akan lebih bersifat dua arah, kompetitif, multidisipliner, serta tingginya produktivitas. Untuk itu, Kementerian Pertanian (Kementan) terus berupaya lahirkan dan menyiapkan petani muda generasi milenial yang berdaya saing.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementan Momon Rusmono menyampaikan bahwa Kementan terus berupaya dalam mencetak generasi muda yang mandiri, professional dan berdaya saing tinggi. Ini sesuai dengan fokus pemerintahan Jokowi-JK dalam pengembangan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.

Sebagai bagian dari komitmen untuk lahirkan petani muda generasi milenial, Kementan telah mentransformasi Sekolah Tinggi Penyuluh Pertanian (STTP) menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) bertaraf internasional dengan kurikulum yang memadai sebagai lembaga vokasi. Mengingat penerapan teknologi informasi dan komunikasi khususnya dalam pengembangan pendidikan nasional saat ini menjadi sesuatu yang wajib. Sehingga era globalisasi telah memicu kecenderungan pergeseran dalam dunia pendidikan dari pendidikan konvensional (tatap muka) ke arah pendidikan yang lebih terbuka. "Transformasi ini didesain untuk mencetak milenial tani profesional yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru dan memiliki sertifikasi internasional," ujar Momon.

Namun dengan kian pesatnya perkembangan di era milenial saat ini, tantangan yang dihadapi generasi muda bisa dikatakan juga kian kompleks, akibat kemudahan akses informasi yang ditopang internet dan media sosial ibarat dua sisi mata uang. Di satu sisi bisa menumbuhkan iklim kreatif dan semakin luasnya pengetahuan, tapi di sisi lain, berpotensi menyebabkan dekadensi moral dan spiritual.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kepala Pusat Pendidikan Pertanian BPPSDMP Kementan Idha Widi Arsanti mengungkapkan bahwa peran orangtua, guru, dan dosen sebagai pengawas dan pengarah, menjadi sangat penting agar generasi muda memiliki pondasi moral yang kuat di dalam diri. "Generasi muda harus bisa membedakan mana yang baik dan buruk yang bisa menjamin masa depan generasi muda Indonesia tetep cerah, " ujarnya.

Lebih lanjut Idha menyebutkan bahwa saat ini dibutuhkan revitalisasi elemen-elemen pendidikan yang mampu menangkal dan menyaring pengaruh buruk yang berpotensi masuk ke dalam diri generasi muda. Salah satu elemen yang dibutuhkan generasi muda pertanian saat ini adalah Penguatan Pendidikan Karakter. Untuk itu, pada 2017 Kementan melalui BPPSDMP menyelenggarakan Pelatihan Bimbingan Teknis dan Bimbingan Asuh bagi Pengasuh Mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) dan Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan dan nantinya akan dilanjutkan pada 2019.

Pendidikan karakter merupakan pendekatan langsung untuk pendidikan moral dengan memberi pelajaran kepada peserta didik tentang pengetahuan moral dasar untuk mencegah mereka melakukan perilaku tidak bermoral atau membahayakan bagi diri sendiri maupun orang lain dan juga membentuk karakter peserta didik menjadi SDM yang tangguh, handal dan profesional.

"Dalam waktu singkat penandatanganan naskah kerjasama antara BPPSDMP dan Gubernur Akademi Militer (AKMIL) akan dilaksanakan secara konkrit melalui Pelatihan Bela Negara, Pola Asuh dan pendidikan karakter serta manajemen," jelas Idha saat melaksanakan kunjungan ke Akademi Militer (Akmil) di Magelang, Jawa Tengah pada Kamis (10/1/2019). **(tim humas)**

PEMERINTAH **BERHASIL** CAPAI SWASEMBADA BERAS DAN JAGUNG

KEMENTAN-Jakarta: Selama empat tahun Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) telah berhasil dicapai swasembada beras dan jagung. Keberhasilan ini ditopang dengan kesuksesan produksi Padi, Jagung dan Kedelai yang terus menunjukan peningkatan melalui program Kementan.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, sesuai dengan konsensus negara yang tergabung di Food and Agriculture Organization (FAO), bahwa swasembada yang dimaksud memiliki defenisi jika suatu negara mampu memenuhi pangannya 90 persen dari kebutuhan. "*Nah* kita sudah mampu mewujudkan definisi itu. Secara

fakta empiris bahwa pangan kita aman. Untuk beras misalnya, selama 2016 tidak ada impor, yang ada hanya luncuran dari tahun 2015, dimana impor pada tahun itu lebih karena ada elnino terbesar sepajang sejarah," katanya, Sabtu (19/1/2019).

Lebih dari itu, lanjut Amran, selama 2007 Pemerintah Indonesia tidak pernah melakukan impor beras jenis medium. Yang ada, saat itu pada 2018 impor 1,7 juta ton, namun hanya sebagai stock beras untuk 1 Januari 2019 yang berjumlah 2,3 juta ton. "Jadi ada beras impor 1,7 juta, tapi masih didalam gudang. Dengan kata lain kita tidak komsumsi beras impor sejak 2016 sampai dengan 17 Januari 2019. Jadi kalau ditanya apa sih tujuan impor? *Ya* kami jawab itu untuk menambah *stock & supply* yang pada gilirannya akan menekan harga," jelasnya.

Bukti dari itu semua, lanjut Amran, saat ini pemerintah memiliki banyak *stock and supply* beras di Pasar Induk Beras Cipinang yang melimpah ruah hingga dua kali lipat dari standar. "Artinya hukum ekonomi *supply demand* tidak berlaku untuk mafia," tandasnya.

Amran mencontohkam, pada 1984 Indonesia pernah mendapat pengharhagaan swsembada pangan dari FAO. Tapi perlu dicatat, saat itu jumlah penduduk hanya 100 juta lebih dengan kebutuhan impor 414.000 ton. "Bisa dibandingkan dengan kondiai saat ini. Bahwa harus diakui penduduk Indonesia mencapai 260 juta lebih, tapi kita bisa memenuhi kebutuhan mereka, bahkan expor kita meningkat 29 persen. Kemudian PDB (Produk Domestik Bruto) dari tahun 2013 sampai 2018 mencapai 400 Trilliun lebih," katanya.

Begitu pula dengan kebutuhan jagung. Kata Amran, impor jagung pada 2014 mencapai 3,5 juta atau setara dengan 10 triliun. Selanjutnya pemerintah menyetop akses impot secara mendadak. Tak lama kemudian, pemerintah berhasil membalikan keadaan dengan mengexpor 380.000 ton pada tahun 2017 dan 2018. "Di saat yang sama kita impor 130.000 ton karena ulah beberapa perusahaan yang mengakibatkan peternak kecil berteriak. Di situlah kita putuskan impor untuk menyelamatkan peternak 2,5 juta," pungkasnya. **(tim humas)**

MENUJU SWASEMBADA DAGING MELALUI BELGIAN BLUE

KEMENTAN-Bogor: Sapi Belgian Blue yang dikembangkan Balai Embrio Ternak (BET) Cipelang, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan) dinilai mampu membawa Indonesia swasembada daging di tahun tahun mendatang. Pasalnya, jenis sapi dari Belgia ini sangat produktif dari performa postur dan pertambahan bobotnya.

"Sampai Desember 2018 ini, sudah lebih dari 100 ekor kelahiran sapi Belgian Blue hasil inseminasi buatan dan transfer embrio," kata Yanyan Setiawan, kepala Seksi Pelayanan Teknis Pemeliharaan Ternak saat ditemui di Kandang Indukan BET Cipelang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (19/1/2019).

Menurut dia, sapi ini merupakan rumpun sapi potong kelompok bos Taurus yang memiliki keunggulan konformasi perototan dan persentase karkas yang tinggi, yakni sekitar 20 persen. "Kandungan lemak sapi ini juga relatif rendah karena memiliki efisiensi penggunaan pakan yang baik. Belum lagi, potensi produksi karkas yang tinggi sehingga bagus untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat Indonesia," jelasnya.

Yanyan mengatakan, pengembangan sapi ini merupakan intruksi langsung dari Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman sebagai upaya pemenuhan kebutuhan daging dan bibit sapi unggul secara nasional. "Ini bukan sapi biasa, pertambahan bobot badannya tinggi sekali, per hari bisa mencapai 1-1,5 kilogram," katanya.

Meski demikian, pengembangan sapi Belgian Blue masih bersifat terbatas karena hanya ada di 11 UPT. Ini dilakukan karena masih ada beberapa kajian yang perlu dilakukan oleh peneliti dan tim pakar pendukung seperti Badan Litbang Pertanian serta Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia, dan Perguruan Tinggi.

Kepala Pelayanan Teknis Produksi dan Aplikasi, BET Cipelang, Ilyas mengatakan, sapi-sapi keturunan Belgian ini nantinya akan dikembangkan hingga ke seluruh pelosok Indonesia dengan catatan sudah mendapat rekomendasi dari komisi bibit. "Komisi Bibit merekomendasikan sperma Belgian Blue boleh diedarkan, apabila mampu produksi pada 2019. Sebab, sapi ini ditargetkan mampu profuksi secara besar pada 2021 akhir dan sudah siap produksi semen beku di 2022," katanya.

Lebih dari itu, lanjut Ilyas, Balai Embrio Ternak Cipelang sudah bisa memproduksi sperma sapi Belgian Blue dalam waktu dekat. Pencapaian ini dianggap sebagai keberhasilan sekaligus menunjukkan pengembangan sapi Belgian Blue di Indonesia memberi hasil positif.

"Saat ini pejantan Belgian Blue sudah siap diproduksi spermanya, untuk sapi murni kita punya Gatot Kaca, kalau untuk silangan ada lima ekor sapi pejantan," katanya.

Mengenai hal ini, Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Sugiono mengatakan, pihaknya akan kembali melakukan kajian untuk mendapatkan data akurat soal tumbuh kembangnya Belgian Blue. "Kita sudah kaji dan hasilnya bagus. Tapi akan kita kaji lagi di tingkat peternak agar datanya akurat. Apabila sudah bagus manajemenya, baru kita distribusikan ke masyarakat," katanya.

Sugiono berharap pengembangan sapi ini terus ditingkatkan sebagai salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan produksi daging sapi dalam negeri yang memiliki kebutuhan cukup tinggi. "Sapi Belgian Blue memiliki bobot lebih besar dibanding sapi pada umumnya. Oleh karena itu, diharapkan dapat meningkatkan produksi daging sapi dalam negeri," pungkasnya. **(tim humas)**

LUNCURKAN SANTRI TANI MILENIAL, MENTAN DIDAULAT JADI BAPAK SANTRI NASIONAL

KEMENTAN-Jakarta: Kementerian Pertanian (Kementan) dalam waktu dekat akan meluncurkan program Santri Tani Milenial. Program ini merupakan upaya kepedulian pemerintah terhadap kaum muda, terutama kelompok santri. "Diharapkan para santri memiliki kemampuan usaha bertani maupun beternak, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan mereka," ujar Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Kuntoro Boga Andri dalam keterangan pers, Minggu (20/1/2019).

Sesuai arahan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, Program Santri Tani Milenial merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap perjuangan santri dan kiai yang selama ini telah menjadi bagian terdepan dalam berjuang melawan bangsa penjajah. Peluncuran direncanakan akan dilakukan di Tasikmalaya, Jawa Barat.

Boga menyebutkan, terpilihnya Tasikmalaya karena dikenal sebagai daerah yang banyak dihuni oleh para santri.

Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum merespon positif program yang diusulkan oleh Menteri Amran tersebut tersebut. Program Santri Tani Milenial bisa membangun kemandirian santri. "Saya sangat berterima kasih kepada Mentan yang telah menunjukkan kepedulian terhadap kelompok santri. Dengan program ini, kami yang lahir dari kalangan pesantren, termasuk santri merasa bangga atas perhatian pak menteri. Karena itu, kami nobatkan beliau sebagai Bapak Santri Nasional," tuturnya saat berkunjung ke Tasikmalaya, Rabu (16/1/2019).

Sebagai bagian dari Program Santri Tani Milenial, pemerintah akan memberikan beragam bantuan antara lain bibit ayam, traktor, dan benih tanaman. "Bantuan akan diberikan sesuai dengan kebutuhan santri di setiap daerah. Forum pesantren yang akan merapatkan bentuk bantuannya," terang Uu.

Lebih lanjut, Uu mengajak semua kaum santri untuk bertani atau bercocok tanam. "Santri tidak hanya memiliki karakter keimanan dan ketakwaan, santri juga harus bisa dalam bidang pertanian," ungkapnya. **(tim humas)**

KINERJA KEMENTAN DAPAT APLAUS DARI DPR RI

KEMENTAN-Jakarta: Kinerja Kementerian Pertanian (Kementan) mendapat aplaus atau apresiasi dari kalangan legislator. Ini terungkap dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bersama jajarannya di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/1/2019).

Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Edhy Prabowo mengapresiasi capaian kinerja Kementan selama kurun waktu empat tahun ini. "Produksi gabah dan jagung harus dipertahankan untuk kepentingan bangsa yang lebih luas," tandasnya.

Senada dengan Endang Srikati Handayani, anggota Partai Golkar dari Dapil Jawa Tengah dan H Cuncun Ahmas Samsurijal,legislator PKB dari Dapil Jawa Barat memuji Kementan yang giat dalam mendorong ekspor dan sukses meningkatkan kesejahteraan petani.

Fadholi dari Fraksi Demokrat juga menyampaikan ucapan terima kasih dari para petani di daerah konstituentnya yang telah banyak menerima bantuan dari pemerintah, khususnya Kementan dalam empat tahun terakhir.

Fadholi mengatakan, bantuan bibit kopi, alat dan mesin pertanian (alsintan) serta sarana produksi lainnya sudah diterima oleh masyarakat dan sangat bermanfaat dalam meningkatkan usaha tani mereka.

Sementara itu, Raker Komisi IV dengan jajaran Kementan digelar untuk membahas pagu anggaran Kementan 2019 yang telah disahkan pada 2018, yakni sebesar Rp 21,8 triliun. Penetapan anggaran itu didasarkan pada data luas lahan lama, sebelum ada pembaruan dari

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) yang bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Raker dipimpin langsung Ketua Komisi IV Fraksi Partai Gerindra Edhy Prabowo, Wakil Ketua Fraksi Parta Golkar Roem Kano, Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Michael Watitimena, Wakil Ketua Fraksi PAN Viva Ypga Mauladi, Wakil Ketua Fraksi PKB Daniel Johan dan sejumlah anggota dari perwakilan provinsi lain.

Komisi IV DPR RI sangat mendukung upaya yang telah dilakukan Kementan untuk tidak menggunakan data lahan yang dikeluarkan Kementerian ATR sebagai basis penghitungan anggaran 2019.

Edhy mengungkapkan bahwa tidak ada yang lebih memahami situasi lahan sawah lebih baik daripada Kementan. "Kementan yang lebih tahu. Masa kita meragukan data Kementan. Yang kami takut nanti, kalau pakai data Kementerian ATR, pegawai Kementan sampai tingkat kabupaten tidak mau merealisasikan karena anggaran yang dipakai itu dianggap menyalahi," ujarnya.

"Kalau pakai data Kementerian ATR terus mau di-*adjust* lagi, nanti lama lagi," tutur legislator dari Fraksi Partai Gerindra tersebut. Kalaupun, ternyata nanti data milik Kementan terbukti benar-benar keliru, menurut Edhy, penindakan bisa dilakukan kemudian.

Mengenai perbedaan data BPS pendekatan lama (eye estimate) dengan pendekatan baru melalui Kerangka Sampel Area (KSA) yang sempat menjadi polemik, Edy menegaskan, agar Kementan jangan ragu menyampaikan hitungan dari kementerian teknis terkait kondisi dan data produksi pangan nasional. "Saya ingin menyampaikan pada Kementan bahwasannya kalau datanya benar sampaikan saja," tandasnya.

Jika Gudang Penuh, Bulog Ekspor

Selain Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman beserta para pejabat Eselon I dan II, raker juga dihadiri manajemen dan para Direksi BUMN Sektor Pertanian serta Kepala Dinas dari sepuluh wilayah sentra padi. Dalam sesi penjelasan, Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) mengatakan, Bulog menargetkan ekspor beras ke sejumlah negara tetangga pada pertengahan 2019. Target ini diprediksi akan berlangsung seusai panen raya pada pertengahan April hingga akhir Mei 2019.

"Makanya, kita targetkan Januari sampai April itu kita akan menyerap 1,8 juta ton beras dari petani. Kalau ditambah dengan sisa beras, kita hasilnya bisa lebih dari 4 juta ton, kan kita masih punya sisa 2,1 juta," katanya.

Menurut Buwas, alasan lain dari ekspor ini soal kapasitas gudang Bulog yang hanya menampung 3,6 juta ton. Kalau dipaksakan, maka hasilnya bisa merusak beras secara perlahan. Untuk itu, ekspor merupakan langkah tepat untuk efisiensi dan menjamin pengawasan. "Jadi, untuk mengawasi kelebihan itu, saya bekerja sama dengan beberapa menteri, termasuk Menteri Pertanian kita harus berupaya ekspor beras ke beberapa negera. Sudah kita petakan dan kita juga sudah membangun komunikasi, ternyata mereka juga membutuhkan beras," katanya.

Meski demikian, Buwas mengaku belum bisa menjelaskan secara detail berapa total ekspor yang akan berlangsung nantinya. Kemungkinan besar, tahap awal yang akan dikirim sekitar kurang lebih 100 ribu ton. "Kita lihat perkembangannya nanti. Yang pasti bagaimana caranya supaya petani tidak dirugikan. Artinya di saat gabah harganya tinggi, petani juga harus bisa jual dengan nilai jual yang tinggi. Di saat panen raya harus kita serap. Intinya kita berprinsip petani harus untung dan jangan dirugikan," katanya.

Buwas mengaku sangat hati-hati dalam menjalankan impor. Untuk komoditas jagung, Bulog mengimpor berdasarkan pesanan dan kebutuhan pengguna. "Kami tidak menjualnya di pasar bebas dan sangat selektif dalam pendistribusiannya. Bulog tidak ingin impor yang dilakukan merugikan petani jagung," ujarnya. Bulog juga disampaikan berkomitmen akan menyerap jagung petani di saat panen raya nanti. **(tim humas)**

IMPOR 730.918 TON JAGUNG

2018 UNTUK INDUSTRI, BUKAN PAKAN, BAHKAN EKSPOR 341 RIBU TON

KEMENTAN-Jakarta: Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan bahwa impor jagung 730.918 ton jagung pada 2018 untuk bahan baku industri makanan dan minuman, gluten dan sweetener, bukan untuk pakan ternak. Selain impor, pada 2018 pun Indonesia mengekspor jagung total 341 ribu ton.

"Penting untuk menjadi catatan kita semua, bahwa empat tahun lalu, Indonesia impor jagung 3,5 juta ton nilainya Rp 10 triliun. Kemudian 2016 impor menurun drastis hingga 2017 tidak ada impor jagung pakan ternak. Dan 2018 kita ekspor 341 ribu ton. Artinya di tahun 2018 produksi jagung surplus. Jadi kita harus holistik melihat kondisi jagung," jelas Direktur Serealia, Direktorat Jenderal (Dirjen) Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian (Kementan) Bambang Sugiharto di Jakarta, Selasa (21/1/2019).

Untuk diketahui sesuai Permendag No 21/2018, bahwa importasi jagung untuk pakan ternak diputuskan melalui Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan proses impor melalui penugasan ke BUMN. Pada 2018 diputuskan impor jagung pakan ternak 100 ribu ton dengan realisasinya pada akhir 2018 sebesar 73 ribu ton dan sisanya direalisasikan pada awal 2019.

"Artinya impor jagung pakan ternak pada 2018 itu hanya 73 ribu ton, realisasi impornya dilakukan Bulog. Selebihnya jagung untuk kebutuhan industri. Mekanisme importasi jagung pakan ternak memang berbeda dengan impor jagung pangan dan industri," terang Bambang.

"Impor jagung pakan ternak 73 ribu ton ini pun disediakan Pemerintah untuk berjaga-jaga bagi peternak yang setiap saat membutuhkan tinggal membeli ke Bulog. Namanya sebagai cadangan, ya dijadikan stok saja, bila tidak dipakai," pintanya.

Terkait impor jagung berupa gluten dan sweetener, Bambang menyebutkan seiring dengan perkembangan industri dalam negeri, rata-rata impor jagung jenis ini mencapai 500 hingga 700 ribu ton per tahun. Ini jenis jagung industri yang berbeda dengan jagung pakan ternak.

Jagung untuk industri sebagian besar juga diproses wet milling menjadi bahan pangan dan bahan industri lainnya terus diekspor. Jadi ada nilai tambah dari jagung ini.

"Ke depan jenis jagung untuk bahan industri ini dengan varietas benih dan teknologi tertentu dapat kita produksi sendiri," terangnya.

Lebih lanjut Bambang menambahkan di bulan Januari 2019 ini beberapa daerah sentra produksi tengah memasuki musim panen jagung yang akan berlangsung hingga bulan April. Pada puncak panen yakni Maret dan April, dipastikan produksi melimpah dan untuk melindungi petani pemerintah akan mengekspor jagung.

"Jadi di saat musim panen, kita ekspor jagung. Ini penting agar harga tetap stabil atau menguntungkan petani," pungkasnya. **(tim humas)**

MENTAN AMRAN
PALING BERANI LAWAN
MAFIA PANGAN

Rektor IPB Beri Apresiasi

KEMENTAN-Bogor : Program prioritas Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam pemberantasan mafia pangan demi mewujudkan kedaulatan pangan mendapat apresiasi dari pimpinan kampus. "Menteri Amran ini saya yakin menteri yang paling berani melawan mafia pangan. Tepuk tangan untuk beliau. Dulu dua bulan sebelum diumumkan yang siapa bakal menjadi Menteri Pertanian, saya termasuk yang prediksi Pak Amran yang jadi menterinya. Pak Menteri Amran ini pun selalu hadir diundang IPB (Institut Pertanian Bogor)," ujar Dr Arif Satria SP MSi, rektor IPB dalam Seminar Nasional Ketahanan Pangan dan Launching IPB SDGs Network yang diselenggarakan IPB bersama Forum Rektor Indonesia di Kampus IPB, Kamis (24/1/2019).

Hadir pada kegiatan tersebut Mentan Amran, Rektor Universitas Hasanuddin, Rektor Universitas Padjajaran, Rektor Universitas Bengkulu, Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Rektor Universitas Majalengka, Rektor Universitas Juanda, Rektor Universitas Pakuan, (Mantan) Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, Koordinator IPB SDGs Network, Bayu Krisnamurthi, Ketu Umum Himpunan Alumni IPB, dan para pejabat lingkup IPB.

Arif Satri menjelaskan, dalam menyikapi isu-isu strategis untuk mewujudkan kedaulatan pangan, saat ini IPB ini sedang membangun sistem tentang Revolusi Industri 4.0, sehingga mafia pangan tidak ada lagi. Yakni, Agromaritim 4.0 guna menjawab kebutuhan pangan saat ini dan yang akan datang.

"Revolusi Industri 4.0 sudah menjadi sebuah keniscayaan, mau tidak mau, suka tidak suka harus dilakukan. Sekarang eranya jadi premium menjadi freemium, jadi semuanya dengan kemajuan teknologi menjadi cepat dan murah," jelasnya.

Menurut Arif Satri, penekanan Revolusi Industri 4.0 di bidang pertanian, yakni teknologi dan inovasi pertanian yang harus serba tepat, seperti pemupukan, menggunakan alat-alat yang cerdas, penggunaan bibit unggul dan menciptakan agro logistik. Dulu orang berpikir bahwa hulu, hilir, produsen, prosesing, kemudian perdagangan melekat ke konsumen. Namun demikian, sekarang sudah menggunakan web sehingga informasi menjadi simetris dan tidak lagi asimetris.

"Jadi, petani bisa mengontrol industri, sehingga tercipta saling mengontrol dan akhirnyan transparan. Sistem ini sedang dikembangkan tentang Revolusi Industri 4.0, sehingga mafia pangan tidak ada lagi," ujarnya.

"Nanti tugas Menteri Pertanian akan lebih ringan, tidak lagi berhadap langsung dengan mafia pangan. Inilah gambaran bahwa teknologi pertanian sedang dikembangkan," sambung Arif Satria.

Mentan Amran Sulaiman yang hadir menjadi Keynote Speech mengapresiasi bahwa IPB selalu mendukung kebijakan dan program Kementan, sehingga tidak pernah mengganggu jalannya program.

Lebih lanjut Amran membeberkan capaian kebijakan pangan selama empat tahun pemerintahan Jokowi-JK. Hal ini di antaranya terlihat dari data BPS, lompatan inflasi pangan pada 2014 sebesar 10,57 persen menjadi 1,26 persen pada 2017. "Ini lompatan yang luar biasa, bisa dikatakam terbesar sepanjang sejarah indonesia. Melompati 12 negara besar seperti Jerman dan China dilompati," bebernya.

Capaian berikut, sambung Amran, Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian meningkat 47,2 persen dari Rp 994,8 triliun pada 2013 menjadi Rp 1.463,9 triliun pada 2018. Ini pun merupakan lompatan kinerja pangan yang luar biasa. "Data PDB pertanian ini sudah divalidasi oleh BPS. Jadi dari dua lompatan ini saja yakni penurunan inflasi dan kenaikan PDB, empat pemerintahan Jokowi-JK menggembirakan. Dan lompatan ini tidak terlepas dari IPB dan perguruan tinggi lainnya. Ini adalah kinerja dari kerja kita bersama. IPB men-support teknologi baru," ucap Amran.

Oleh karenanya, dia pun mengapresiasi gebrakan Rektor IPB yang selalu mencetak teknologi baru. Pasalnya, hal ini sejalan dengan mimpi Kementan, yaitu mentransformasi pertanian tradisional menjadi modern. "Mimpi besar kita, *Insya Allah* pada 2045, Indonesia menjadi lumbung pangan dunia," pungkasnya. **(tim humas)**

OPINI

SEBUAH KENISCAYAAN MENGEDUKASI **PETANI** UNTUK BERALIH KE SISTEM BERBASIS **DIGITAL**

Hendy Fitriandoyo SP

"BANYAK kemudahan dan inovasi yang diperoleh dengan adanya dukungan teknologi digital, selain layanan menjadi lebih cepat dan efisien serta memiliki jangkauan koneksi yang lebih luas, hidup juga menjadi lebih mudah dan murah. Meski demikian, digitalisasi program juga membawa dampak negatif dimana peran manusia setahap demi setahap diambil alih oleh mesin otomatis, akibatnya jumlah pengangguran semakin meningkat dan hal ini tentu saja akan menambah beban masalah lokal maupun nasional..."

Beberapa bulan yang lalu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta kepada masyarakat untuk mengambil bagian dalam Revolusi Industri 4.0 yang sudah dilakukan oleh negara negara maju di berbagai belahan dunia, karena konsep Industri 4.0 sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya saing Indonesia di era digital dan pada intinya, jika kita menerapkan industri 4.0 bisa mendapatkan hasil yang maksimal yaitu, peningkatan pendapatan, penghematan biaya serta efisiensi operasional. Apalagi, Indonesia memiliki modal besar untuk sukses menerapkan industri 4.0. Namun demikian, meski pemerintah telah membuat peta jalan atau road map "Making Indonesia 4.0" untuk mengantisipasi segala perubahan yang terjadi pada Revolusi Industri 4.0. peta jalan itu, tak serta merta membuat pemerintah dengan mudah bisa menerapkan Industri 4.0 di seluruh industri dalam negeri. Setidaknya, terdapat dua hal yang mendukung pengembangan industri di era digital, yaitu pasar yang besar dan jumlah sumber daya manusia yang produktif.

Seiring dengan bonus demografi yang bakal didapat Indonesia pada 2030 mendatang, maka pemerintah harus fokus menangani aspek paling krusial dalam implementasi industri 4.0, yakni sumber daya manusia (SDM), dimana kalau kita bicara revolusi industri 4.0 maka salah satu kelemahan atau tantangan terbesarnya adalah banyak tenaga kerja yang enggak kompatibel dan kalau dibiarkan nanti jadinya akan terjadi pengangguran besar-besaran. Peningkatan kapasitas atau kemampuan SDM perlu dilakukan, pasalnya, 70 persen SDM Indonesia hanya bermodalkan pendidikan SMA ke bawah, bahkan banyak lulusan yang belum siap kerja. Tetapi kalau bicara peningkatan kapasitas, enggak bisa bicara monopoli pemerintah saja karena pemerintah kan punya kemampuan terbatas, anggarannya terbatas. Makanya memang butuh kolaborasi pihak universitas, komunitas, dan industri untuk sama-sama meningkatkan kapasitas SDM ini sebab kalau tidak ya mereka enggak akan bisa bersaing.

Rendahnya Partisipasi Petani Dalam Pengambilan Keputusan

Peningkatan SDM tidak hanya dibatasi peningkatan produktivitas petani. Namun, juga peningkatan kemampuan petani untuk lebih berperan dalam proses pembangunan. Persoalan krusial dalam peningkatan SDM adalah rendahnya partisipasi petani dalam pengambilan keputusan pembangunan pertanian. Hal ini antara lain disebabkan oleh tidak adanya suatu organisasi yang memiliki kekuatan politik untuk memperjuangkan kepentingan petani di forum nasional di negara berkembang. Peningkatan SDM selain berkaitan dengan peningkatan produktifitas petani juga diarahkan pada peningkatan partisipasi politik petani dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan

mereka melalui organisasi petani mandiri. Peran aktif pemerintah dalam peningkatan SDM petani antara lain melalui reorientasi sistim penyediaan layanan dan pendanaan sistim informasi pertanian.

Revitalisasi kinerja kelembagaan dan penyuluh pertanian akan memberikan kontribusi positif bagi peningkatan SDM pertanian. Selain itu, pemberian ruang yang cukup untuk sektor swasta melalui privatiasi penyuluhan juga akan mendorong terciptanya penyediaan layanan informasi pertanian yang lebih kompetitif, efisien, dan efektif. Peningkatan SDM petani dan pertanian sangat erat kaitannya dengan upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan. Dalam pengertian luas pemberdayaan merupakan proses memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu keberlanjutan.

Bagaimana pun juga membangun SDM pertanian tidak terlepas dari pembanguan dalam berbagai aspek strategis petani. Yaitu, aspek produksi dan ekonomi, sosial, dan ekologi. Keberhasilan penguatan aspek tersebut yang akan menentukan apakah kualitas SDM pertanian dan pedesaan akan meningkat nyata atau berjalan di tempat.

Undang Undang (UU) No 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengatur mulai ketersediaan pangan, distribusi, keamanan, perlindungan konsumen, ketahanan pangan, dan ketentuan pidana masih belum relevan dengan kebutuhan di era Revolusi Industri 4.0. Untuk itu, instansi pemerintahan terutama DPR dinilai perlu melakukan revisi terhadap produk Undang-Undang terkait sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat di era milenial. Pertanian era digital merupakan peluang sekaligus tantangan bagi masyarakat Indonesia, untuk itu, respon pemerintah dengan adanya perubahan ini memang seharusnya dengan cepat ditanggapi. Persoalan yang mendasar adalah bagaimana adanya sistem pertanian digital ini dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas dan masif.

Tugas utama pemerintah dan pemangku kepentingan yaitu mengedukasi petani untuk beralih dari sistem tradisional ke sistem yang berbasis digital. Langkah yang paling mudah dilakukan yaitu merangkul dan mendorong generasi muda untuk terlibat aktif dan terjun ke bidang pertanian di era digital. Potensi generasi muda memiliki andil besar dalam perubahan sistem pertanian di Indonesia, disebabkan oleh dua hal yaitu pertama pemuda lebih adaptif terhadap adanya perubahan dan kedua semangat yang lebih besar sehingga bisa lebih produktif.

Revolusi Industri 4.0 Pertanian Belum Terlalu Dominan

Pertanian merupakan salah satu sumber perekonomian terbesar di Indonesia. Dengan adanya pembangunan pertanian yang baik, perekonomian negara akan lebih stabil. Pada era digital seperti saat ini, dunia pertanian dipenuhi dengan isu revolusi industri 4.0, dimana pertanian diharapkan melibatkan digital dalam proses pengembangannya. Salah satu tujuan Revolusi Industri 4.0 di sektor pertanian adalah meningkatkan produktivitas pertanian secara efektif dan efisien. Dari tujuan tersebut, terlihat bahwa fokus pengembangan pada sektor pertanian masih berupa produk fisik. Padahal, fokus pada produk fisik saja sebenarnya tidak cukup, karena pertanian juga harus ditopang oleh sumber daya manusia yang baik.

Pada era Revolusi Industri 4.0 ini, sumberdaya manusia (SDM) diharapkan mampu mengembangkan pertanian dengan peralatan-peralatan berbasis digital untuk memaksimalkan pekerjaan manusia (petani) itu sendiri. Di sektor pertanian Indonesia, istilah Revolusi Industri 4.0 sudah banyak digunakan. Namun, faktanya bahwa Revolusi Industri 4.0, terutama di sektor pertanian belum terlalu dominan di Indonesia. Kenapa demikian? Karena, Revolusi Industri 4.0 dalam sektor agrikultur ternyata lebih dominan terjadi di Eropa, hal ini disebabkan oleh adanya bencana demografi, yaitu keadaan dimana jumlah penduduk yang berusia produktif lebih sedikit dibanding penduduk yang berusia non-produktif. Oleh karena itu, tenaga mereka digantikan dengan teknologi. *Nah*, sebaliknya, di Indonesia, kita mengalami bonus demografi. Pertanian tradisional masih banyak ditemukan di berbagai wilayah, maka itulah sebabnya Revolusi Industri 4.0 pada pertanian Indonesia belum terlalu dirasakan.

Saat ini, hanya teknologi mobile saja yang dapat digunakan sebagai inovasi pertanian, untuk tujuan meningkatkan peluang para petani dalam mengakses berbagai informasi yang berkaitan dengan komoditas pertanian. Misalnya, harga bibit, harga komoditas di pasar, prediksi masa tanam, pemasaran produk pertanian, dan sebagainya. Proses yang dapat dilakukan dalam pemanfaatan teknologi mobile dalam meningkatkan kualitas sektor pertanian, yaitu yaitu proses on farm dan off farm. Dalam proses on farm, aplikasi digital digunakan untuk mengontrol tanaman dari jarak jauh, sehingga pengawasan terhadap tanaman dapat dilakukan kapan pun dan di mana pun. Salah satu contohnya adalah penggunaan kamera CCTV.

Cara lain yang mulai digencarkan saat ini adalah penggunaan kamera drone untuk mengawasi lahan pertanian, sedangkan untuk proses off farm, aplikasi digital dapat digunakan dalam proses pemasaran dan penelusuran rantai distribusi. Dengan adanya penelusuran, transparansi pada rantai produksi pertanian akan menjadi lebih baik.

**Fungsional Perencana Madya, Biro Perencanaan Kementerian Pertanian*

BANTU PETERNAK AYAM

KEMENTAN & BULOG DISTRIBUSIKAN 5.000 TON JAGUNG

KEMENTAN-Bogor: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Ditjen PKH Kementan) bersama dengan Perum Bulog bergerak cepat membantu para peternak ayam di sentra produksi di Jawa atas arahan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman.

Serah terima jagung dilaksanakan di Divre Bulog Surabaya, Jawa Timur pada Kamis (24/1/2019) untuk distribusikan ke Jawa Barat sekitar 1.000 ton, Jawa Tengah sebesar 2.000 ton, dan Jawa Timur sekitar 2.000 ton. Untuk wilayah Jawa Barat, beberapa asosiasi peternak ayam mandiri seperti Pinsar, Perhimpunan Peternak Unggas Nasional (PPUN), Koperasi Pertanian Karya Agrisatwa dan Koperasi Unggul Selaras akan mewakili penyerahan jagung ke peternak.

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan I Ketut Diarmita mewakili Kementan memfasilitasi pemenuhan kebutuhan jagung bagi peternak mandiri sampai dengan akhir Februari 2019 dengan harga Rp 4000. Ini sebagai bukti kepedulian dan kehadiran pemerintah di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi oleh peternak.

"Kita berharap peternak dapat membeli jagung dari sentra-sentra produksi jagung yang diperkirakan akan mulai memasuki masa panen raya pada akhir Februari 2019," ucapnya saat konferensi pers di Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor. Kamis (24/1/2019). Selanjutnya, lanjut I Ketut, pemerintah berharap harga jagung petani tidak jatuh saat panen raya. Di lain pihak peternak juga masih mendapat harga yang wajar.

Agus Siswantoro, Bulog Divre Jawa Barat mengatakan, bantuan jagung ini dalam rangka membantu peternak mandiri memeperolehjagung dengan harga yang wajar untuk stabilisasi harga. "Bulog akan terus berusaha untuk membantu peternak untuk mendapatkan jagung dengan harga yang wajar dan stabil," ujarnya.

Hartono, ketua PPUN mengatakan, atas nama peternak penerima bantuan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Mentan yang telah membantu peternak kecil. "Karena bantuan ini membantu petani untuk memperoleh jagung dengan harga sesuai harga acuan," tandasnya.

Kadma Wijaya, ketua Koperasi Unggul Selaras Bogor juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah yang sudah dengan sigap membantu meringankan beban peternak, terutama dalam mengatasi kesulitan bahan baku jagung. "Dengan bantuan pemerintah, maka peternak mendapatkan harga jagung yang wajar, sehingga dapat menurunkan biaya produksi," katanya.

Sugeng Wahyudi, sekjen Gopan (Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional) turut mengucapkan terima kasih atas upaya pemerintah melalui Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan atas respon cepat yang diberikan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh peternak mandiri.

Menurutnya, upaya ini memang belum 100 persen menyelesaikan masalah, tetapi kepeduliannya untuk ikut terlibat dalam mengatasi masalah dalam kebutahan pakan peternak patut untuk diapresiasi. "Kami berharap ini merupakan upaya awal dalam mengatasi permasalahan-permasalahan dihadapi oleh peternak, terkait dengan pakan ayam. Kami berharap ada kesinambungan agar ketersediaan pakan *sustainable*," tuturnya.

Sugeng menjelaskan, pihaknya tidak dapat langsung menerima jagung, tetapi ini harus dikerjasamakan dengan pihak lain dalam hal ini pabrik pakan ternak. Sebab untuk peternak Broiler (perdaging) jagungnya tidak dapat diolah sendiri, namun harus dikerjasamakan yang dilengkapi dengan perjanjian tertulis.

"Hal ini sangat berbeda dengan pola pakan pada peternak layer (petelur). Oleh karena itu, ke depan kami berharap Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat memfasilitasi untuk merekomendasi keinginannya, dan ini akan lebih mudah jika jagung ini juga bisa disediakan untuk partnernya, yaitu pabrik pakan ternak dengan harga yang wajar," pungkasnya. **(tim humas)**

15.000 SANTRI SE-INDONESIA
DAPAT PELATIHAN AGRIBISNIS

MENTAN
LAUNCHING
SANTRI TANI
MILENIAL

KEMENTAN-Tasikmalaya: Kementerian Pertanian (Kementan) terus melakukan terobosan meningkatkan produksi pertanian di berbagai komoditas melalui peningkatan minat generasi muda. Sebanyak 15 ribu santri dari seluruh Indonesia melakukan dialog dan mendapatkan pelatihan agribisnis agar bisa menerapkan praktik usaha modern pertanian dari hulu ke hilir.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam sambutannya menyatakan bahwa kegiatan bertajuk 'Launching Santri Tani Milenial' tersebut merupakan upaya serius Kementan dalam regenerasi di sektor pertanian. Hal ini penting mengingat kebutuhan pangan masa depan akan semakin besar seiring laju pertumbuhan penduduk, tapi pekerja sektor pertanian justru turun dan diisi oleh petani yang senior.

"*Alhamdulillah* ada energi baru untuk pertanian kita, santri milenial yang jumlahnya 4 juta seluruh Indonesia. Kita sudah buat peraturan agar mereka bisa akses langsung ke Kementerian tanpa prosedur yang berbelit. Salah satu bantuan adalah kita alokasikan 1 juta ayam untuk seluruh pesantren," katanya dalam sambutan bertajuk 'Launching Santri Tani Milenial' di Lapangan Pasar Munding, Desa Kamulyaan, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada Jumat (26/1/2019).

Amran menyatakan, memperkenalkan dan menggerakkan santri milenial adalah pilihan strategis untuk regenerasi dan meningkatkan produktivitas pertanian. Melibatkan para santri merupakan bagian dari program yang lebih besar, yakni gerakan 1 juta petani milenial yang sudah ditetapkan sebagai program prioritas membangun manusia Indonesia pada 2019.

Dalam kegiatan yang dihadiri perwakilan pondok pesantren seluruh Indonesia tersebut Kementan memberikan bantuan secara langsung benih unggul untuk padi, jagung, dan tanaman hortikultura. Begitu juga dengan ternak, ada 102 ekor sapi, 500 ekor kambing/domba, dan 10.000 ekor ayam, serta bantuan alat mesin pertanian (alsintan) berupa 10 hand tracktor. Jumlah ini masih terus berkembang sambil melakukan pendataan potensi pesantren-pesantren yang ada.

"Kegiatan ini tidak sekedar seremonial karena bantuan dan pelatihan yang dilakukan kongkrit dan akan dimonitoring oleh unit-unit pelaksana teknis. Harapannya, pesantren bisa mendorong produktivitas pertanian dan menghasilkan banyak entrepreneur muda bidang pertanian ketika kembali ke masyarakat," papar Amran.

Berdasarkan data Badan Penyuluhan dan Pengambangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Gerakan Petani Milenial ini sendiri melibatkan satu juta petani milenial yang tergabung dalam 40.000 kelompok petani. Mereka tersebar di seluruh provinsi di Indonesia dimulai dari Aceh sampai ke Papua, dan dibagi dalam zona kawasan jenis komoditas pertanian mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

"Jumlah petani milenial setiap provinsi berbeda-beda berdasarkan jumlah petani yang tergolong ke dalam usia milenial, yaitu 19-39 tahun. Atau, petani yang tidak berada dalam range umur tersebut tetapi berjiwa milenial, tanggap teknologi digital, tanggap alsintan dan mempunyai lahan," kata Kepala BPPSDMP Momon Rusmono.

Wirausaha Santri dan Kemandirian Pesantren

Sebelum membuka acara Santri Tani Milenial, Mentan Amran menyempatkan menempatkan diri untuk menengok pelatihan pertanian untuk para santri di

Pondok Pesantren Miftahul Huda. Di pesantren yang lokasinya sekitar dua km dari lokasi acara tersebut, Amran berinteraksi langsung dengan sejumlah santri yang antusias mengikuti pelatihan pengoperasian alsintan di sawah hingga pelatihan peternakan khususnya sapi, domba, dan ayam.

Tak hanya teori, para santri tersebut langsung menerapkan ilmunya. Sejak berdirinya di pertengahan 1960-an, para santri di pesantren ini memang telah terbiasa memenuhi kebutuhan 4.000 santrinya dengan bertani. "Dari lebih dari 30 hektare (ha) lebih lahan milik pesantren, setengahnya adalah lahan pertanian dan sudah dikembangkan untuk sawah, kebun untuk bawang, buncis hingga cabai, juga peternakan, hingga lahan hidroponik untuk sayuran," kata KH Asep Maoshul Affandy, pimpinan pesantren Miftahul Huda.

Dengan program Kementan untuk memberdayakan santri untuk sektor pertanian, Asep yang juga merupakan anggota DPR RI ini sangat menyambut baik. Menurutnya, secara praktik, banyak pesantren yang sudah memperkenalkan pertanian kepada santrinya bahkan menjadikan pertanian sebagai usaha pemenuhan kebutuhan pesantren, tapi akan lebih terarah jika ditopang dengan pelatihan dan bantuan dari pemerintah.

"Program Santri Tani Milenial oleh Kementan sangat baik untuk menambah semangat regenerasi petani sekaligus membangun kemandirian pertanian berbasis pesantren. Bukan sekedar ilmu pengetahuan, tapi langkah nyata meningkatkan kesadaran, minat, dan bekal berwirausaha tani saat kembali ke masyarakat," tuturnya.

Kabupaten Tasikmalaya dipilih sebagai lokasi peluncuran Gerakan Santri Tani Milenial karena selain memiliki banyak pesantren, juga merupakan sentra pertanian

produktif. Pada 2017, Tasikmalaya memiliki luasan lahan untuk pertanaman padi sebesar 128.589 ha dan lahan kering untuk pertanaman sayuran sebesar 26.570 ha. Produksi padi di Kabupaten Tasikmalaya pada periode tersebut sebesar 823.818 ton sementara sayuran bervariasi sesuai dengan komoditasnya.

Launching Santri Tani Milenial juga dihadiri Anggota DPR RI, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Razhanul Ulum, Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto, sejumlah pimpinan pondok pesantren se-Indonesia, perwakilan dari sejumlah kementerian terkait seperti Sekretariat Negara, Kementerian BUMN, Kemenko Perekonomian, Kemendes, dan Kemenag, juga mitra strategis dari perusahaan perbankan, dan kelompok tani. **(tim humas)**

KEMENTAN PEDULI BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI SULSEL

KEMENTAN-Gowa: Kementerian Pertanian (Kementan) bersama para mitra dan stakeholders menghimpun bantuan untuk meringankan beban korban bencana banjir yang menimpa sebagian wilayah di Sulawesi Selatan (Sulsel). Bantuan terkumpul senilai Rp 2 miliar lebih berupa mie instan, air mineral, pakaian, beras, popok bayi, telur, tenda, selimut, serta bahan makanan siap saji lainnya.

Bantuan tersebut berasal dari beberapa pihak yang membantu antara lain PT Tiran, Sahabat Rakyat Indonesia, Charoen Phokphand Indonesia, Japfa Comfeed, dan Malindo. Bantuan langsung diserahakan Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Sesditjen PKH) Kementan Nasrullah mewakili Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman yang diterima langsung oleh Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman di hadapan korban banjir di Kabupaten Gowa, Minggu (27/1/2019).

Nasrullah mengatakan, penyaluran bantuan ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang terkena musibah banjir dan tanah longsor. Bantuan langsung disalurkan ke sejumlah daerah yang terkena dampak banjir dan tanah lonsor seperti di sebagian Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Jeneponto, Maros, dan daerah lainnya.

"Sebagai bentuk kepedulian Kementan menghimpun bantuan bersama mitra kerja, sehingga *alhamdulillah* sekarang sudah terkumpul dan akan kami salurkan kepada beberapa daerah di Sulsel," ujarnya.

Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengucapkan terima kasih kepada Kementan dan seluruh mitra kerja yg sudah memberikan bantuan. Bantuan ini akan disalurkan ke beberapa kabupaten yang terkena musibah di Sulsel. "*Alhamdullillah.* Terima kasih kami ucapkan kepada Kementan dan mitra kerjanya. *Insya Allah* kita salurkan ke beberapa kabupaten yang terkena bencana di Sulsel," katanya.

Perlu diketahui, banjir dan tanah lonsor yang menimpa sebagian wilayah di Sulawesi Selatan ini menyebabkan kerugian materil dan jatuhnya korban jiwa. Pusat Data Informasi Pemerintah merilis sekitar 68 orang dinyatakan meninggal dunia akibat dampak bencana di Sulsel.

Turut hadir dalam penyerahan bantuan tersebut Sekda Gowa Muchlis, Lurah Pangkabinayya, dan Lurah Pangka Binanga Syahril. **(tim humas)**

CATAT!

SEKTOR PERTANIAN

PIMPIN PENGUATAN IHSG

KEMENTAN- Jakarta: Kinerja sektor pertanian selama pemerintahan Jokowi-JK kembali mencetak prestasi baru. Selain meningkatkan nilai investasi, sektor pertanian pun kini menjadi sektor yang memimpin penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

"Iya, kinerja sektor pertanian empat tahun Jokowi-JK memimpin penguatan indeks di antara delapan sektor saham," ujar Kepala Biro Humas dan Informasi Publik, Kementerian Pertanian (Kementan) Kuntoro Boga Andri di Jakarta, Sabtu (26/1/2019).

Berdasarkan publikasi Robotorial Beritagar.id, indeks dipengaruhi oleh delapan sektor saham di antaranya sektor pertanian, industri dasar, pertambangan, properti industri konsumsi, infrastruktur, perdagangan, dan manufaktur.

"Sektor yang terbesar berkontribusi menguatkan indek, yakni sektor Pertanian, disusul sektor Industri Konsumsi, dan saham-saham di sektor Pertambangan (lihat grafis)," ungkap Kuntoro.

Lebih lanjut dia menyebutkan, kinerja sektor pertanian menguatkan indeks tersebut memang layak dicapai. Pasalnya, berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) nilai investasi pertanian meningkat selama kurun waktu 2013-2018.

"Kemudian, sektor pertanian menjadi sektor terdepan juga dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Dari data BPS (Badan Pusat Statistik), Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian meningkat. Ini merupakan lompatan kinerja pangan yang luar biasa," sebutnya.

Untuk diketahui, perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) ditutup pada Jumat (25/1/2019) terkoreksi naik ke Zona Hijau 0,25 persen, atau 16,19 poin di level 6.482,84. Sepanjang perdagangan saham, IHSG sempat mencapai 6.498,33 poin di titik tertinggi, dan terendah 6.470,12 poin. **(tim humas)**

SEKTOR TERBESAR KONTRIBUSI KUATKAN IHSG

Pertanian	:	1,8 persen **(29,40 poin)**
Industri Konsumsi	:	0,37 persen **(9,72 poin)**
Pertambangan	:	-11,03 persen **(6,07 poin)**

NILAI INVESTASI PERTANIAN*

Meningkat **110,2** persen
Total nilai investasi Rp 270,1 triliun
- Kurun waktu selama 2013-2018

PERTANIAN DONGKRAK EKONOMI NASIONAL**

- Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat 47,2 persen
- Pada 2013 sebesar Rp 994,8 triliun
- Naik pada 2018 menjadi Rp 1.463,9 triliun

Catatan :
- *Data BKPM
- **Data BPS

Sumber: Diolah

OASE KABINET KERJA DORONG PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MELALUI SEKTOR PERTANIAN

KEMENTAN- Banyuwangi : Ibu Negara RI Iriana Jokowi dan Ibu Mufidah Jusuf Kalla bersama Tim Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja (OASE KK) melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Senin (28/1/2019).

Hadir mendampingi Ibu Negara dan Ibu Mufidah Jusuf Kalla, yaitu Ketua Umum OASE KK Erni Guntarti Tjahyo Kumolo, Ibu Martati Amran Sulaiman, Ibu Rugaiya Wiranto, Direktur Jenderal (Dirjen) Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) Suwandi, dan para pemangku kepentingan.

Salah satu agenda kunjungan ini, yakni sosialisasi pemanfaatan lahan pekarangan dengan tanaman pertanian produktif untuk peningkatan pendapatan masyarakat khususnya rumah tangga.

Sebagaimana Visi OASE KK, yaitu sukseskan Nawacita, wujudkan Indonesia berkarakter, bebas narkoba, sehat sejahtera. Dan program kerja yang dilakukan terkait pendidikan karakter, kesehatan keluarga, sosial dan budaya, lingkungan bersih dan lingkungan hijau.

Sesuai dengan tujuan untuk mendukung gerakan yang bertemakan Revolusi Mental, OASE KK menyusun program-program yang dapat mengubah pola pikir dan memberdayakan masyarakat agar dapat hidup mandiri, produktif, kreatif, dan berkarakter. Semua ini adalah modal sosial yang dapat membawa bangsa Indonesia untuk maju dan sejahtera.

Salah satu program lingkungan hijau yaitu penanaman pohon atau tumbuhan produktif untuk mengurangi dampak dari pemanasan global dan program biopori dimana mengedukasi masyarakat untuk belajar mencintai alam beserta isinya sedini mungkin. Kali ini di Banyuwangi, Ibu Negara, Iriana Jokowi beserta rombongan melakukan penanaman pohon klengkeng sekaligus membagikan 1.500 bibit pohon tanaman jeruk kepada para peserta parenting, 250 klengkeng dan 250 mangga ke sekolah-sekolah.

Terkait kunjungan ini, Dirjen Hortikultura Suwandi menuturkan Kementan memberikan dukungan penuh agar sosialisasi penanaman tanaman pertanian produktif memberikan manfaat pada masyarakat dan generasi muda milenial. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengerahkan sepenuhnya semua unit lingkup Kementan agar komoditas pertanian benar-benar memberikan tambahan pendapatan rumah tangga dan juga menjadi peluang usaha bagi generasi muda.

"Kementan menyediakan bibit buah unggul berupa 1.500 pohon jeruk, 250 pohon mangga, dan 250 pohon lengkeng. Bibit ini dihasilkan sendiri oleh Kementan melalui Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Timur, Badan Litbang Kementan," ujarnya.

Bantuan bibit tersebut diberikan kepada peserta parenting, sosialisasi narkoba, sekolah-sekolah, keluarga besar Persit Kartika Chandra Kirana dan PKK. Selain bantuan bibit tersebut, Kementan pun menyediakan bibit buah dalam pot (tabulampot) yang sudah berbuah untuk menambah penghijauan di lokasi yang dikunjungi. "Tanaman buah dalam pot ini salah satu hasil inovasi teknologi dari Kementan. Ini penting disosialisasikan ke masyarakat khususnya generasi muda agar bisa memanfaatkan lahan pekarangan atau lahan sempit," sebut Suwandi.

Ketua Bidang Lingkungan Hijau Rugaiya Wiranto mengatakan, gerakan menanam tanaman produktif diberikan agar masyarakat bisa menanam di pekarangan masing-masing atau halaman kantor. "Tanaman ini agar dipupuk dan dirawat, mari kita mencintai produk lokal dari negeri sendiri," jelasnya.

Sementara itu, Kepala BPTP Jatim Chendy Tafakresnanto mengatakan, bantuan yang diberikan berupa varietas Jeruk Siam Pontianak, Mangga Gadung dan Garifta, serta Lengkeng Diamond River. "Penerima bantuan nantinya akan diberikan pendampingan," ujarnya.

Perlu diketahui agenda kunjungan kerja Ibu Negara bersama Tim OASE, yakni pertama, mengunjungi PAUD Muslimat Khodijah 157 Rogo Jampi. Di lokasi ini siswa-siswi diajarkan cara bercocok tanam dalam polybag dan melatih cara memindahkan tanaman ke dalam polybag.

Kedua, mengunjungi Puskesmas Gitik. Ibu Negara dan rombongan melakukan penanaman pohon buah produktif yaitu mangga dan lengkeng, sosialisasi deteksi dini kanker serviks dan kanker payudara dengan pemeriksaan Inspeksi Visual Asetat (IVA) dan Pemeriksaan Payudara Klinis (Sadanis).

Ketiga, mengunjungi STIKES Banyuwangi. Ibu Negara memberikan motivasi kepada Ibu-ibu dan penyerahan bantuan 1.500 bibit pohon buah Jeruk. Keempat, Ibu Negara dan rombongan mengunjungi GOR Banyuwangi. Ibu Negara memberikan bantuan 200 bibit pohon buah Mangga dan Lengkeng dan berdialog dengan siswa-siswi SD dan SMP di Banyuwangi. **(tim humas)**

KEMENTAN-Jakarta: Langkah Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman yang sering turun ke lapangan bertemu petani, sangat tepat untuk mengetahui persoalan mendasar petani dan lahan pertanian di seluruh Indonesia. Demikian disampaikan Dewan Pembina Institute Agroekologi Indonesia (INAgri) Achmad Yakub mengapresiasi kinerja Amran selama menjabat sebagai Menteri Pertanian.

"Kita harus menghargai kinerja Pak Amran. Saya lihat beliau jarang banget di Ragunan (Kantor Kementan di Jakarta). Justru dia lebih banyak di lapangan. Itu memang karakter dia. Tapi saya harap dalam setiap turun ke lapangan, Pak Amran tetap menerapkan pendekatan undang-undang (UU) perlindungan dan pemberdayaan petani," ujarnya di Jakarta, Jumat (25/1/2019).

Yakub mengatakan, pemberdayaan dan perlindungan itu sudah diatur dalam bentuk UU No 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. *Nah*, selama ini, secara personal maupun kelembagaan, Kementan dinilai mampu membawa amanat UU tersebut, sehingga berdampak pada peningkatan produksi.

"Bukti dari penerapan UU itu adalah program Serasi (Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani). Dengan Serasi produksi padi dan hortikultura meningkat. Menurut saya, Kementan sudah menjalankan amanat itu. Kementan mampu menetapkan tata ruang wilayah di provinsi dan nasional serta membedakan mana yang disebut lahan pertanian dan non pertanian," katanya.

Meski demikian, Yakub mengingatkan agar Kementan mempersulit konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian. Misalnya, ketika sebuah lahan pertanian dijadikan pabrik, maka konsekuensinya adalah mengganti lahan pertanian tadi menjadi tiga kali lipat.

"Ketika sebuah lahan sudah disebut sebagai kawasan pertanian, maka konsekuensinya harus ada irigasi dan dipersulit untuk terjadinya konversi tanah ini menjadi non-pertanian. *Kan* UU yang saya sebut tadi sudah mengaturnya," kata dia.

Yakub juga mengapresiasi trobosan Serasi karena program ini belum pernah dilakukan oleh menteri-menteri di era sebelumnya. Meski demikian, program ini sebaiknya ditetapkan dengan kebijakan dan aturan yang ketat.

"Saya kira program rawa ini belum pernah dilakukan oleh para menteri sebelumnya. Makanya, menurut saya bagus sekali karena bisa meningkatkan produksi. Saya setuju, tetapi harus ditetapkan dengan kebijakan," katanya.

Yakub menambahkan, Kementan di bawah kepemimpinan Amran Sulaiman harus memastikan Nilai Tukar Petani (NTP) tetap naik dan menurunkan kemiskinan petani di kota maupun di desa serta menggenjot produksi.

"Saya berharap kementan memperhatikan kelembagaan petani dan petaninya, NTP harus tetap naik, daya beli di pedesaan juga stabil, tingkat kemiskinan kota dan desa juga trenya menurun. Dengan demikian bisa selaras antara kinerja produksi dengan kesejahteraan petani," katanya.

Mengenai hal ini, Mentan Amran menegaskan, Program Serasi adalah langlah strategis yang akan menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Program Serasi telah mengembangkan ribuan lahan rawa menjadi pertanian produktif. Lahan ini diyakni mampu meningkatkan provitas padi dari 2,7 hingga 3,0 ton/ hektare menjadi 5,0 hingga 6,5 ton/ hektare (ha). "Program Serasi juga ditargetkan meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dari satu kali tanam menjadi dua sampai tiga kali tanam (IP300), yaitu menanam padi, padi, jagung atau padi, padi, kedelai dalam satu tahun," kata Amran.

Adapun total lahan rawa yang dioptimalisasikan dalam program ini luasnya mencapai 274.000 ha terdiri dari lahan lebak dan pasang surut yang tersebar di 8 kabupaten/kota. Kabupaten Banyuasin memiliki lahan rawa pasang surut terluas hingga 130.000 ha, kemudian disusul oleh OKI dengan 65.000 ha, Musi Banyuasin 33.000 ha, Ogan ilir 20.000 ha, OKU Timur 10.000 ha, Muara enim 10.000ha, PALI 5000 ha, dan Muratara 1000 ha.

"Contoh keberhasilan pengelolaan lahan rawa lebak sudah ditunjukkan di Kabupaten Ogan Ilir. Produktivitas dapat mencapai 6,5 ton/ hektare yang tadinya tidak bisa dikelola masyarakat karena selalu tergenang dan kemasaman tanah yang tinggi," pungkasnya. **(tim humas)**

IKUTI AMANAT UU

KUNCI SUKSES

KINERJA KEMENTAN

MENTAN AMRAN
LEPAS EKSPOR TEPUNG KELAPA
8.160 TON
Tujuan China, Taiwan, Hamburg, dan Rotherdam

KEMENTAN-Gorontalo: Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengaparesiasi kelapa yang berasal dari para petani di Provinsi Gorontalo. Pasalnya, sejak 2018, tepung hasil dari kelapa yang dibudidayakan masyarakat setempat itu sudah diekspor dan menembus 82 negara.

Pada Rabu (30/1/2019) di Gorontalo, Mentan melepas ekspor tepung kelapa ke China, Taiwan, Hamburg, dan Rotherdam sebanyak 8.160 ton. Total nilainya mencapai USD 8,16 juta. Tepung kelapa itu diekspor oleh PT Royal Coconut sebanyak 3.744 ton dan PT Tri Tunggal sebanyak 4.416 ton. "Ini luar biasa di tengah jatuhnya harga kelapa, kita justru melakukan ekspor. Barusan saya terima laporan dari Kepala Dinas Pertanian Gorontalo, kita juga ekspor kelapa muda ke Australia. Peningkatam produksi kelapa kita luar biasa," ujarnya.

Secara umum, lanjut Amran, Indonesia adalah produsen kelapa terbesar dunia, produksi 2018 mencapai 19 juta ton. Sementara pada 2014, produksi kelapa hanya 1,3 juta ton. "Peningkatannya 52 persen. Ini luar biasa di bawah pemerintahan Jokowi-JK dan di bawah upaya kerja keras gubernur dan bupati," ucapnya.

Melansir data Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, kontrobusi subsektor perkebunan untuk ekspor tepung kelapa di Provinsi Gorontalo sangat besar. Terbukti, jika harga pengambilan butiran kelapa rata-rata Rp 1.200 per butir, total uang yang beredar di tingkat petani mencapai Rp 208,8 miliar per tahun. Luas lahan kelapa di Provinsi Gorontalo mencapai 71.524 ha dengan jumlah tanaman 4.782.200 pohon. Adapun total produksinya 575.864.000 butir per tahun.

Manager Quakity Control dari PT Royal Coconut, Marwan Cjepah menjelaskan, produk tepung kelapa yang dihasilkan 100 persen diekspor. Pasokan kelapa sepenuhnya bersumber dari petani dalam bentuk yang sudah dikeluarkan sabutnya. "Kami terima kelapa dari petani itu untuk proses produksi minimum 150 ton hingga 200 ton per hari dan menghasilkan 24 ton tepung kelapa. Pabrik kami mulai produksi pada awal Januari 2018 dan langsung ekspor ke Eropa, Afrika dan Asia," jelasnya.

Marwan menegaskan, volume ekspor tepung kelapa ini semakin meningkat setiap tahunnya. Keberhasilan pihaknya dan eksportir lainnya melakukan ekspor berkat dukungan dari pemerintah dalam memudahkan pemberian izin ekspor. "Pemerintah era sekarang sangat mendukung perizinan. Semua diurus dengan mudah, yang penting kita memenuhi persyaratannya," tegas dia.

"Begitu pun bantuan untuk petani, Kementan dan pemerintah daerah (pemda) punya program tentang peremajaan kelapa. Ini sangat membantu petani, juga pabrik pengolahan," imbuhnya. **(tim humas)**

GUBERNUR GORONTALO:

KEMISKINAN TURUN SALAH SATUNYA PROGRAM JAGUNG KEMENTAN

KEMENTAN-Gorontalo: Angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo berhasil diturunkan secara signifikan karena Pemerintah Pusat menemukan solusi mujarab. Salah satunya berkat program Kementerian Pertanian (Kementan) melalui jagung yang meliputi bantuan bibit unggul dan pupuk turun tepat waktu serta adanya jaminan harga di tingkat petani.

Demikan disampaikan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie sebagai salah satu narasumber dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) yang mengusung tema 'Pembangunan SDM dan Sektor Pertanian di Gorontalo' pada Rabu (30/1/2019), pukul 08.00-13.00 Wita.

"Pada saat saya dilantik, pada 2012, angka kemiskinan di Gorontalo ini masih 20 persen. Sampai akhirnya kami mendapat solusi, yakni dengan menggratiskan pendidikan, kesehatan. Kami juga melakukan pembangunan infrastruktur, dan menggagas ekonomi kerakyatan, termasuk di dalamnya pertanian dan peternakan," katanya.

Terkait sektor pertanian, Rusli mengakui sebelumnya kondisi petani jagung sangat memalukan. Ini karena seringkali benih kurang bagus atau pupuknya tidak ada. Lantaran itulah ditempuh upaya perbaikan, sehingga akhirnya Gorontalo berhasil mengekspor jagung sampai sebanyak 113 ribu ton.

Kini, sambung dia, pupuk tersedia, bibit pun bagus. Hal lain yang juga dilakukan pemerintah terkait produk jagung adalah, penetapan standar harga jagung, yang tidak boleh kurang dari Rp 3.100. "Kebijakan Mentan itu muncul karena ada kondisi di mana ketika musim jagung panen, harga jagung turun, paling tinggi Rp 1.500. Kemudian saya minta tolong ke Pak Menteri (Mentan). Akhirnya Pak Menteri membuat standar harga hartga jagung tidak boleh di bawah Rp 3.150 per kilogram (kg). Ketika harga di bawah ini, Bulog harus turun membelinya dengan harga Rp 3.150 per kg. Inilah yang membuat petani sejahtera," bebernya.

Diketahui, berdasarkan survei pada September 2018, BPS setempat melansir adanya penurunan angka kemiskinan hingga 0,98 poin, yakni menjadi 15,83 persen atau 188,30 ribu jiwa. Padahal pada Maret 2018, angka kemiskinan masih tercatat di 16.81 persen atau sebanyak 198,51 ribu jiwa.

Penurunan jumlah penduduk miskin dalam kurun Maret 2018-September 2018 tercatat terjadi baik di perkotaan maupun pedesaan. Namun dari angka yang diperoleh juga tampak bahwa penurunan kemiskinan di perkotaan jauh lebih banyak ketimbang di pedesaan.

Selain kinerja sektor pertanian, lanjut Rusli, aksi nyata lainnya untuk menekan kemiskinan adalah dengan menggelar pasar murah. "Kita alokasikan anggaran untuk pasar murah. Ini sejalan dengan perintah Presiden agar negara hadir di tengah-tengah rakyat. Karena itu, setiap hadir di tengah rakyat, kita ada oleh-oleh untuk rakyat yaitu adalah pasar murah. Akhirnya kemiskinan pun turun," tuturnya.

Selain mengedepankan sektor pertanian dan pembangunan infrastruktur sebagai solusi, Rusli mengungkapkan, pemerintahannya juga memandang penting pemenuhan atas kebutuhan listrik di provinsi tersebut.

Diketahui, pada 2012-2014, listrik di Gorontalo berfungsi secara bergilir. Hal itu karena dari total kebutuhan 80 megawatt, yang mampu disiapkan ketika itu hanya 50 megawatt. "*Alhamdulillah*, ketika itu dalam rapat dengan bapak Presiden Jokowi, langsung ditelepon Dirut PLN, hingga kemudian pada 3 juni 2018, presiden meresmikan listrik 100 megawatt di Paguan," katanya.

Alhasil, Gubernur Rusli mengatakan, listrik sekarang surplus 80 megawatt. "Jika dulu tingkat elektrifikasi 48 persen, sekarang 98 persen. Dan pada 2020 target 100 persen. Kita bisa mandi listrik di Provinsi Gorontalo," pungkasnya. **(tim humas)**